



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN AKHIR KEHUMASAN TAHUN 2020

BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

bersama
BAWASLU TEGAKKAN
Keadilan
bersama
RAKYAT **AWASI** **PEMILU**





DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Program Khusus.....	107
Bab III Pengakuan/Penghargaan dari Pihak Lain.....	132
Bab IV Penutup.....	133

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Bawaslu provinsi Kepulauan Riau dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2020.

Humas (Hubungan Masyarakat) adalah fungsi manajemen dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Dengan demikian, fungsi humas menjadi sangat strategis. Humas merupakan ujung tombak instansi pemerintah dalam aktivitas pemberian informasi kepada publik.



Undang-undang KIP merupakan paradigma baru tentang keterbukaan informasi publik dan menjadi awal revolusi transparansi informasi yang menghendaki setiap Lembaga/Instansi Pemerintah harus menyediakan dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Sebagaimana fungsi dan tugas utamanya, humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran sebagai penyampai informasi organisasi/institusi kepada publik (*journalist in resident*), pembangun citra institusi (*institution image*) bagi publik, dan pembangun budaya kerja institusi (*institution culture*) kepada seluruh pegawai.

Akhir kata, semoga Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI, SH., MH



BAB I

PENDAHULUAN

Humas (Hubungan Masyarakat) merupakan bagian penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya dari sebuah instansi pemerintahan. Keberadaan humas berperan sebagai perantara bagi instansi pemerintahan dalam menjalankan komunikasi timbal balik terhadap masyarakat, baik dalam internal maupun eksternal. Humas berfungsi dalam membantu instansi pemerintahan mencapai citra yang positif dan memperoleh kepercayaan masyarakat, serta membantu terlaksananya program-program pemerintah.

Hubungan Masyarakat pemerintahan di era demokrasi modern dewasa ini terasa sangat penting perannya, karena dalam prakteknya humas harus mampu menjadi jembatan penghubung yang diharapkan bisa menjembatani antara kepentingan pemerintah di satu pihak, namun juga masyarakat di pihak lain, sehingga prinsip komunikasi *public relations* yakni komunikasi dua arah timbal balik (*reciprocal two way traffic communication*) benar-benar dapat diterapkan. Dengan adanya komunikasi dua arah timbal balik maka akan lebih mudah untuk mempertemukan dua kepentingan yang mungkin saja berbeda, yakni kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Publik berhak mendapatkan akses informasi dari instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian fungsi humas menjadi sangat strategis karena humas merupakan ujung tombak pemerintah dalam aktivitas pemberian informasi kepada masyarakat luas.

Kehumasan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau semakin maju dalam melaksanakan penyebaran informasi tentang kebijakan, program maupun kinerja-kinerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Fungsi humas dalam mencapai misi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan pengawasan dalam Pilkada Tahun 2020 sangat besar. Dengan didukung oleh kinerja dan program-program kerja kehumasan yang optimal diharapkan mampu memberi dampak positif dan berkelanjutan. Program kerja ini untuk mencapai misi Bawaslu ini tentunya berjalan dan pada hakekatnya tidak lepas dari peran humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri.

Program Kerja Kehumasan

Program kerja kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki kaitan erat dengan misi Bawaslu yaitu dalam meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Adapun program kerja kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diantaranya:

1. Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Sepanjang Tahun 2020

Sesuai perkembangan zaman media sosial saat ini menjadi salah satu medium utama komunikasi publik. Media sosial merupakan sarana bagi humas untuk menyampaikan sarana informasi secara lebih cepat dan menjangkau informasi lebih luas dan kompleks. Humas berperan dalam menampilkan citra baik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau karena humas merupakan wajah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan harus mampu menampilkan pesan-pesan positif Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Berikut beberapa kegiatan peliputan dan dokumentasi sepanjang tahapan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.

* Launching Pengawasan Partisipatif Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu (29/12/2019) di area Taman Laman Boenda Kota Tanjungpinang, atau yang dikenal juga dengan sebutan Gedung Gonggong. Hadir dalam acara ini, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan, SH., MH, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, SH., LL.M, Plt. Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Asisten I Pemprov Kepri, Drs. Raja Ariza, MM, pimpinan OPD Pemprov Kepri, Polda Kepri, Kejati Kepri, perwakilan lembaga negara, partai politik, BUMN, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga kota Tanjungpinang pada umumnya. Adapun dari Bawaslu Provinsi Kepri sendiri hadir dengan formasi lengkap, Ketua Bawaslu Muhammad Sjahri Papene, SH., MH, Rosnawati, MA, Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH., Said Abdullah Dahlawi, ST dan Idris, S.Th.I selaku Anggota, juga hadir Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri, Yessi Yunius, SE., M.Si.





* **Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memperkuat sinergitas dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa (04/02/2020) di kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Muhammad Sjahri Papene beserta Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Indrawan Susilo Prabowoadi dan Koordinator Pengawasan Idris, dan Kepala Sekretariat Yessi Yunius disambut oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Sudarwidadi, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Arif Zahrulyani, Asisten Intelijen Agustian Sunaryo, Dudi Koordinator Aspidum, Kabag TU Ridwan Sujana Angsar dan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Ali Rahim





* **Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Pengawasan Rekrutmen PPK pada Pilkada Tahun 2020**

Kegiatan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota sejak pengumuman sampai pelantikan. Dalam kegiatan ini merupakan syarat utama menjadi anggota PPK adalah non partisan partai politik maupun pendukung salah satu pasangan calon atau bakal pasangan calon. Pembentukan PPK ini dilaksanakan pada 15 Januari – 14 Februari 2020 dengan masa kerja 1 Februari – 30 November 2020.





* **Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Bawaslu RI Meluncurkan Website JDIH**

Bawaslu RI meluncurkan website khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang terintegrasi dengan JDIH Nasional yang dilaksanakan pada hari Kamis (6/2/2020). Hal ini dilakukan sebagai upaya dari Bawaslu untuk meningkatkan mutu pelayanan publik mengenai akses informasi dan dokumentasi hukum. JDIH Bawaslu tidak hanya menyediakan dokumentasi mengenai peraturan perundang-undangan namun juga menyediakan berbagai produk hukum, termasuk putusan sengketa, putusan pengadilan dan produk hukum lainnya yang berhubungan dengan pemilu atau pemilihan. Turut hadir dalam peluncuran JDIH Bawaslu tersebut yaitu Kepala JDIH Nasional, Koordiv Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu, Koordiv Hukum, Humas, dan Hubal Bawaslu Provinsi se-Indonesia, Koordiv Hukum Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan Koordiv Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi se Indonesia, termasuk Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH.



* **FGD Finalisasi Panduan Penggunaan SIPS**

Bawaslu RI melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Panduan Penggunaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang

dilaksanakan pada tanggal 3 - 5 Februari 2020 bertempat di Hotel Mercure BSD City Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dari 12 (dua belas) Provinsi se-Indonesia, termasuk Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, MA. FGD ini dilaksanakan dalam rangka melakukan finalisasi terhadap penyusunan buku modul panduan untuk menggunakan aplikasi SIPS pada Pilkada 2020.



* **SIPS, Modernisasi Pelayanan Penerimaan Permohonan**

Bawaslu RI melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bertempat di Hotel Aryaduta Banten pada tanggal 9-10 Februari 2020, mengundang Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, termasuk Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati MA beserta Kabag/Kasubag Penyelesaian Sengketa dengan staf admin dan operator aplikasi SIPS Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Rakornas ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan admin dan operator dalam menerima permohonan tidak langsung (SIPS) pada Pilkada tahun 2020 sekaligus me-review kembali buku panduan SIPS lewat simulasi serta pembuatan user account untuk admin dan operator aplikasi SIPS.





* **Perkuat Peran Pengawasan dan Humas, Bawaslu se-Kepri Gelar Rapat Koordinasi**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan dan Humas. Rapat yang digelar pada tanggal 13 - 14 Februari 2020 di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini bertujuan memperkuat peran pengawasan dan kehumasan menjelang Pilkada Tahun 2020. Rakor ini dihadiri oleh Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal, dan Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Rakor ini turut mengundang narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Sulastio Tenaga Ahli Divisi Humas Bawaslu RI, Agus Saifuddin dan Pratiwi Eka Putri Staf Humas Bawaslu RI dan Ikhsan selaku Tim Asistensi Divisi Pengawasan Bawaslu RI.





* **Bawaslu RI Analisis Penerapan Laporan Hasil Pengawasan Elektronik**

Bawaslu RI melaksanakan Analisis Hukum Penerapan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Secara Elektronik untuk Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan pada hari Kamis (13/02/2020) bertempat di Jakarta. Kajian yang mengundang Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia ini menjabarkan kendala dan tantangan yang bakal dihadapi para pengawas pilkada di daerah. Dalam kesempatan ini Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi mengapresiasi agenda ini dengan menyampaikan bahwa kajian ini penting bagi kami, karena masih banyak daerah di Kepri yang masih kesulitan mengunggah form A elektronik karena masih minimnya internet yang tersedia, dengan mengetahui status hukum laporan hasil pengawasan elektronik ini dari segi legitimasinya akan dapat meningkatkan kerja-kerja pengawasan Bawaslu, terutama di Provinsi Kepulauan Riau.



* **Bawaslu Provinsi Kepri Sambut Baik Penandatanganan NPHD Polda Kepri**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik realisasi penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemprov Kepri bersama Polda Kepri yang dilaksanakan pada hari Jumat (14/02/2020) di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polda Kepri. Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Muhammad Sjahri Papene menghadiri kegiatan tersebut, bersama Said Abdullah Dahlawi Koordinator Divisi SDM dan Organisasi dan Rosnawati Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepri. Hadir dalam kegiatan penandatanganan NPHD tersebut, Kapolda Kepri, Wakapolda Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri dan Komisioner KPU Provinsi Kepri.



* **Bawaslu Kepri Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 2020**

Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Hotel Tren Central, Kabupaten Natuna. Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 17 - 19 Februari 2020 ini diikuti 37 peserta yang terdiri dari Ketua dan Anggota beserta staf

admin dan operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan agar Bawaslu Kabupaten/Kota terundang khususnya staf yang menjadi admin ataupun operator dapat memahami dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi SIPS dalam menerima permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataupun Bakal Pasangan Calon pada Pilkada 2020.



* **Bawaslu Kepri Gelar Diskusi Publik Menangkal Hoax & Politisasi SARA di Pemilihan 2020**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara diskusi publik menangkal Hoaks dan politisasi SARA di Pemilihan 2020 pada tanggal 19 Februari 2020 yang bertempat di Kota Tanjungpinang. Acara ini dihadiri oleh organisasi kemahasiswaan, akademisi mahasiswa, lembaga pemantau ormas, dan media massa. Dalam acara ini dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal, Indrawan Susilo Prabowoadi dengan narasumber Sekjen KIPP Indonesia Kaka Suminta, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, dan Kanit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri I Putu Bayu Pati, SIK., MH.





* **Bawaslu Kepri Mengawasi Penyerahan Syarat Dukungan Paslon Gubernur & Wakil Gubernur Kepri Tahun 2020**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebut yang dimulai pada tanggal 16 - 20 Februari 2020 yang bertempat di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau. Pengawasan ini bertujuan agar mengetahui sejauh mana calon sudah melakukan entry data ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).



* **Peluncuran IKP 2020, Bawaslu Siap Cegah Potensi Pelanggaran**

Guna pemantapan pengawasan, pemetaan dan pencegahan potensi pelanggaran, Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, di Hotel Redtop Jakarta pada hari Selasa (25/2/2020). IKP dirancang memetakan potensi kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berlangsung di 270 daerah dengan fungsi antisipasi dan pencegahan dini. Turut hadir dalam kegiatan ini Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



- * **Bawaslu Kepri dan Bawaslu Karimun Ajukan Uji Materi UU Pilkada di MK**
Bawaslu Kepri dan Bawaslu Karimun mengajukan Uji Materi (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) terhadap UUD 1945. Dalam uji materi tersebut, pihak yang menjadi Pemohon adalah Indrawan Susilo Prabowoadi selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Kepri dalam hal ini sebagai Pemohon II serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Tiuridah Silitonga, Nurhidayat, dan Mohammad Fadli yang secara berurutan sebagai Pemohon I, III, dan IV.



* **Bawaslu Rekrut 417 Panwaslu Kelurahan Desa (PKD)**

Dimulai sejak tanggal 16 - 22 Februari 2020 Bawaslu di sejumlah Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan melaksanakan pembukaan Pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepri Said Abdullah Dahlawi mengatakan bahwa sebanyak 847 pendaftar akan dilakukan pemeriksaan administrasi dan wawancara.



* **Pelaksanaan Bimtek Manajemen Risiko oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Bawaslu Kepri**

BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko pada tanggal 25 – 27 yang bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yunius, SE., M.Si dan diikuti oleh pejabat struktural beserta para staf di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Tim yang terdiri 5 orang BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yakni Heru Setiawan selaku wakil penanggung jawab, Pandapotan Manalu selaku pengendali teknis, Yuniar selaku Ketua tim serta 2 (dua) anggota tim yakni Rahmat Syawal Siregar dan Bayu Triyo Prihatin.



* **Pelantikan Empat Pejabat Struktural Bawaslu Kepri**

Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia, Dr. Gunawan Suswantoro melantik dan mengambil sumpah janji 183 pejabat administrator/pejabat pengawas di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan Panwaslih Provinsi Aceh. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ini dilaksanakan di Jakarta pada hari Jumat (28/02/2020). 4 (empat) pejabat diantaranya yang akan bertugas di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah Takwin Saleh, SH sebagai Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, & Hukum, Zul Fahmi, SE sebagai Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum, Ridwan, SH sebagai Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, dan Siska Ernidawati, S.Si sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMN. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Yessi Yunius, SE., M.Si yang juga turut menghadiri pelantikan tersebut menyampaikan bahwa formasi jabatan yang dilantik tersebut sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019.



* **SIPS, Sistem Informasi Bawaslu Untuk Mempermudah Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membuka ruang aduan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 melalui sistem berbasis online. Proses pengaduan dapat diakses lewat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di website resmi <https://sips.bawaslu.go.id/>. Bawaslu

Provinsi Kepulauan Riau melalui Divisi Penyelesaian Sengketa senantiasa aktif melakukan monitoring serta memantau progres terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa yang masuk agar keseluruhan proses yang dilalui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



* **Pengisian Data Kependudukan Secara Online oleh BPS Provinsi Kepri di Bawaslu Provinsi Kepri**

Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik melaksanakan perekapan data sensus penduduk yang kini dapat dilakukan secara online yaitu dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan pengisian data kependudukan secara online di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2020 yang bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yunius SE., M.Si dan diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi, pejabat struktural beserta para staf di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.





* **Tingkatkan Kinerja dan Kapasitas Pengawas, Bawaslu Provinsi Kepri Gelar Bimtek Penanganan Pelanggaran**

Bawaslu Provinsi Kepri terus mematangkan kesiapan jelang Pilkada Tahun 2020. Berbagai inovasi terus dilakukan guna adanya penguatan terhadap jajaran. Seperti halnya pada 3 Maret 2020 ini. Bawaslu Provinsi Kepri menggelar pembukaan kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang bertempat di Nagoya Mansion Hotel, Kota Batam. Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari hari Selasa 3 Maret hingga 5 Maret ini adalah sebagai bentuk persiapan dalam melaksanakan fungsi Penanganan Pelanggaran dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri. Bimtek Penanganan Pelanggaran ini dibuka oleh Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Ratna Dewi Pettalolo.



* **Peresmian Kantor Sentra Gakkumdu dan Balai Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang**

Anggota Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH meresmikan Kantor Sentra Gakkumdu dan Balai Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu (04/03/2020) bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang. Balai Pengawasan yang dimaksud memiliki 3 (tiga) sarana diantaranya pojok pengawasan, media center, dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Peresmian ini dihadiri oleh Ketua & Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Penasihat, Pembina/Koordinator & Anggota Sentra Gakkumdu, Dandim 0315 Bintan, Kesbangpol Linmas Kota Tanjungpinang, Ketua & Pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Tanjungpinang, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Tanjungpinang, serta relawan pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang.





* **Bawaslu Kepri Melakukan Pendampingan Verifikasi Administrasi**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan supervisi pendampingan pengawasan verifikasi administrasi dan dokumen kegandaan bakal calon perseorangan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kota Batam yang dilaksanakan pada hari Jumat (06/03/2020) di KPU Kota Batam.



* **Bawaslu Kepri Hadiri FGD Pola & Problematika Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sjahri Papene menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pola dan problematika penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Jumat (06/03/2020).



* **Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif**

Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Sekolah ini dibuka dalam rangka mempersiapkan kader-kader yang berkompeten, yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tahapan Pilkada 2020. Rekrutmen pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 – 15 Maret 2020.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No. HP : Ade (0822 4299 7979)
Nodar (0852 2804 3578)

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Bawaslu Kab/Kota atau Pemwascam terdekat

SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TIMELINE REKRUTMEN

- ◀ Sosialisasi & Pendaftaran 10 - 15 Maret 2020
- ◀ Seleksi Administratif 14 - 15 Maret 2020
- ◀ Pengumuman Peserta Lolos Seleksi Administratif 15 Maret 2020
- ◀ Wawancara Calon Peserta Sekolah Kader 16 - 21 Maret 2020
- ◀ Pengumuman Kelulusan Final 23 Maret 2020
- ◀ Pelaksanaan Sekolah Kader 30 Maret - 3 April 2020

PENDAFTARAN

Mengirimkan Berkas Pendaftaran ke Bawaslu Kab/Kota atau Pemwascam sesuai dengan wilayah asal/domisili dengan cara:

1. Mengampaikan berkas secara langsung di Kantor Bawaslu Kab/Kota atau Pemwascam.
2. Melalui Email Bawaslu Kab/Kota atau Pemwascam.
3. Melalui WA (CF) sesuai pelaksanaan masing-masing Kab/Kota (untuk pengiriman berkas melalui Email/WA berkas diserahkan dalam bentuk PDF & Wajib menyerahkan berkas fisik pada saat wawancara).

Syarat Umum

1. Usia minimal 18 tahun, maksimal 30 tahun.
2. Pendidikan minimal SMA.
3. Tidak pernah menjadi Anggota, Pengawas, ataupun Tim Sukses Partai Politik atau pun peserta pemilu/pemilihan tertentu.
4. Sehat Jasmani & Rohani.
5. Tidak pernah atau sedang terlibat Kasus Hukum.
6. Memahami Kepemilihan & Pengawasan Pemilu.
7. Bebas dari Narkoba.

SELEKSI ADMINISTRATIF

Syarat Administratif Formasi Pendaftaran:

- 1. Pria/Wanita 8-12%.
- 2. Pendidikan/Suara (Lokal/Desain).
- 3. Total Pengawasan Partisipatif 2020 (Berkas Pendaftaran).
- 4. Syarat dengan Sama Pengawasan Partisipatif Pemilihan 2022.

Format dan Mengirimkan Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (lewat pesan dari website atau Lembaran (Buku Materi) & atau Pakar).

Data Pendaftaran (Lihat KIR)

1. Surat Keterangan aktif dalam organisasi/komunitas.
2. Surat Keterangan/Verifikasi Keterserahan dalam laporan Keterserahan (Dinas, Sekolah, Siswa, Pemuda, dan lain-lain) sebagai calon peserta pemilu, dll.

Logo: Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

* **Bawaslu Kepri Hadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Uji Materi UU Pilkada di MK**

Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bersama Komisioner Bawaslu Kabupaten Karimun

menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVIII/2020 di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu (11/03/2020).



* **Perekrutan PKD di Kepri Terpenuhi**

Dalam pelaksanaan perekrutan PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) sebanyak 1.898 jumlah pendaftar menyerahkan berkas pendaftaran di 417 daerah Kelurahan dan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau. Said Abdullah Dahlawi selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi hal tersebut dengan mengatakan bahwa kami mengapresiasi kerja Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) yang telah melakukan perekrutan PKD, juga kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai *leading sector* proses perekrutan PKD sehingga kuota pendaftar PKD dapat terpenuhi.





* **Efektifkan Pengelolaan Hibah, Bawaslu Kepri Gelar Penyusunan Rencana Kerja dan Reviu Anggaran**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara Penyusunan Rencana Kerja RKA-KL, Penelitian dan Reviu Anggaran Hibah Pilkada 2020 Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, di Sahid Batam Center Hotel and Convention pada hari Kamis (12/03/2020). Hal tersebut bertujuan agar penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Said Abdullah Dahlawi, ST selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Yessi Yunius, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Tim Perencanaan yang dipimpin oleh Bashory, Kasubbag Program dan Anggaran Bawaslu RI dan Tim Pengawas Internal (PI) yang dipimpin oleh Agustin Rafika Sari, Kasubbag Pemeriksa Keuangan sebagai Narasumber dan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kepri dan staf sebagai peserta.



* **Himbauan Upaya Pencegahan Penularan COVID-19**

Penyebaran virus corona terus meningkat dan menimbulkan korban jiwa di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Dr. Gunawan Suswantoro mengeluarkan Surat Edaran Tentang Himbauan Pencegahan Penularan COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*). Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yuniuss SE., M.Si juga menyampaikan bahwa sesuai instruksi dari Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, untuk kegiatan apel pagi yang biasa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 agar dihindari guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta agar menyediakan cairan disinfektan di meja *security* dan di setiap ruangan kerja. Selain itu, Yessi juga menambahkan bahwa seluruh pegawai di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau agar tetap menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi, cukup istirahat, selalu membiasakan mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, dan yang paling penting selalu meminta perlindungan kepada Allah SWT.



* **Siaran Pers Bawaslu RI Antisipasi Penyebaran Virus COVID-19**

Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan siaran pers dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Pada siaran pers tersebut, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota agar tidak terganggunya tahapan yang sedang berjalan saat ini.



* **Penundaan Pelaksanaan SKB CPNS Bawaslu Formasi TA 2019**

Sehubungan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penundaan Jadwal Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.



* **Perkuat Pengelolaan JDIH, Bawaslu Kepri Lakukan Vidcon Dengan Bawaslu RI**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan video conference (vidcon) bersama dengan 8 (delapan) Bawaslu Provinsi yang dilaksanakan pada Kamis, 19 Maret 2020, diantaranya termasuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Vidcon ini sebagai salah satu upaya dalam memaksimalkan kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Bawaslu dan dalam rangka realisasi kegiatan penguatan pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) Bawaslu Gelombang II yang ditunda pelaksanaannya. Pada kegiatan vidcon ini dibuka langsung oleh Fritz Edward Siregar, SH, LL.M, P.hD selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu RI.



* **Jumlah PKD Terpilih Pilkada 2020 di Kepri**

Laporan jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) terpilih untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	BATAM	12	52	12	64
2	TANJUNGPINANG	4	12	6	18
3	NATUNA	15	65	12	77
4	LINGGA	13	71	11	82
5	KARIMUN	12	55	16	71
6	KEPULAUAN ANAMBAS	10	47	7	54
7	BINTAN	10	41	10	51
JUMLAH		76	343	74	417

* **Situasi Darurat COVID-19, Sekjen Bawaslu RI Lakukan Koordinasi Melalui Telekonferensi**

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) melakukan *video conference* (vidcon) pada hari Kamis, 19 Maret 2020 bersama dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia, termasuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang hadir dalam vidcon ini adalah Kepala Sekretariat dan pejabat struktural Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Vidcon ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah, meminimalisasi penyebaran, dan mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Bawaslu serta memastikan pelaksanaan tugas dan

fungsi kerja dapat berjalan secara efektif. Selain itu, dengan adanya media online, dapat membantu dalam menunjang kerja-kerja ataupun melaksanakan tugas kantor walaupun berada di rumah atau work from home (WFH).



* **Cegah Covid-19, Bawaslu Provinsi Kepri Lakukan Penyemprotan Disinfektan**

Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan mitigasi sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya penyebaran COVID-19 atau virus corona di lingkungan kantor. Salah satunya adalah dengan melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di area lingkungan kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada Jumat (20/3/2020). Penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau. Agus Siswanto selaku Kasi Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Riau sangat mengapresiasi upaya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini.



* **Matangkan Persiapan Pilkada 2020, Bawaslu Kepri Audiensi Bersama KPU Kepri dan Polda Kepri**

Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan audiensi ke Mapolda Kepulauan Riau pada Rabu (18/03/2020). Dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang ikut hadir dalam acara ini adalah Muhammad Sjahri Papene selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan juga Kordiv (Koordinator Divisi) Penindakan Pelanggaran, Indrawan Susilo Prabowoadi selaku Kordiv Hukum, Humas & Datin, Idris selaku Kordiv Pengawasan, Said Abdullah Dahlawi selaku Kordiv SDM dan Organisasi. Turut hadir juga dalam audiensi tersebut KPU Provinsi Kepulauan Riau. Audiensi dilaksanakan dalam rangka mematangkan persiapan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang serta untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas Bawaslu, KPU dan Polda di Provinsi Kepulauan Riau selaku stakeholder Pilkada.





* **Pengumuman Hasil SKD CPNS Bawaslu Formasi Tahun 2019**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengumumkan hasil tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Bawaslu Formasi Tahun 2019. Dari hasil SKD tersebut, sebanyak 926 peserta yang telah dinyatakan lulus serta berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), termasuk 14 peserta dari Provinsi Kepulauan Riau. Pengumuman ini berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D4062/III/20.01 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019.



* **Tunda Tahapan Pilkada 2020, KPU Kepri Gelar Rakor Bersama Bawaslu Kepri**

Menyebarnya wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia juga berdampak pada tertundanya tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menindaklanjuti SK KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilaksanakan pada Senin (23/03/2020). Dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang menghadiri kegiatan tersebut diantaranya Muhammad Sjahri Papene selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga merupakan Koordinator Divisi

(Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Idris selaku Kordiv Pengawasan dan Sosialisasi, Indrawan Susilo Prabowoadi selaku Kordiv Hukum, Humas dan Datin, Said Abdullah Dahlawi selaku Kordiv SDM dan Organisasi dan Rosnawati selaku Kordiv Penyelesaian Sengketa.



* **Bawaslu RI Mengadakan Vidcon Terkait Data Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020**

Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI Ratna Dewi Petalolo melakulan Video Confrence (vidcon) bersama Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Se-Indonesia yang dilaksanakan pada Kamis (26/03/2020). Vidcon ini merupakan bentuk koordinasi terkait dengan data penanganan pelanggaran dan hambatan yang terjadi pada saat melakukan penanganan pelanggaran pada pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



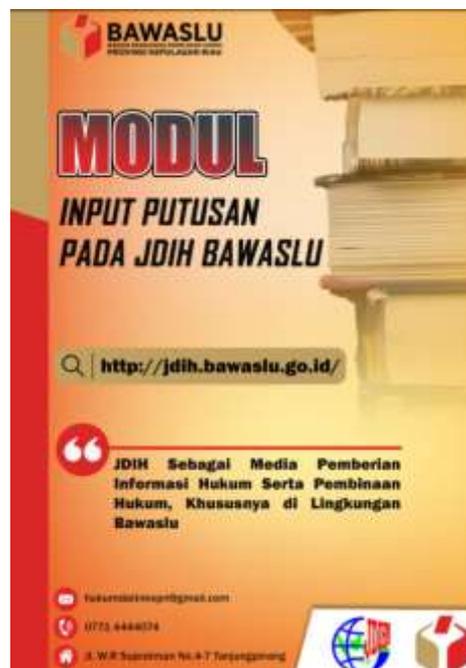
* **Monev Hukum & Kehumasan dengan Bawaslu Batam & Lingga Melalui Telekonferensi**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan *video conference* (vidcon) dengan Bawaslu Kota Batam dan Bawaslu Kabupaten Lingga yang

dilaksanakan pada Kamis (26/03/2020). Vidcon ini langsung dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH. Vidcon ini dilaksanakan sebagai antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 dan dalam rangka monitoring & evaluasi produk hukum dan penguatan kehumasan.



* **Modul Input Putusan Pada JDIH Bawaslu**



* **Wabah Corona, Bawaslu Kepri Melakukan Koordinasi Pengawasan Melalui Video Conference**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan video conference untuk berkoordinasi terkait pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020, bersama 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Koordinasi pengawasan melalui video conference dipimpin langsung oleh Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I dengan agenda menyampaikan beberapa informasi perkembangan terakhir dari Bawaslu RI terkait penundaan pemilihan kepala daerah tahun 2020.



* **Pilkada 2020 Ditunda, Kasek Gelar Rapat Via Vidcon**

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 (Pilkada 2020) disepakati untuk ditunda dan bahwa masih menunggu dikeluarkannya perpu. Penundaan ini disepakati oleh Bawaslu bersama DPR, Kemendagri, DKPP, dan KPU pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Senayan, Senin (30/03/2020). Menanggapi hal itu, Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yunius segera menggelar rapat terbatas bersama Koordinator Sekretariat (Korsek) dan Bendahara Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Selasa (31/03/2020) menggunakan fasilitas *Video Conference* (Vidcon).





* **Bawaslu Kepri Mengikuti Kelas Peningkatan Kapasitas Pengelola PPID Bawaslu Provinsi via Vidcon**

Dalam rangka peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyelenggarakan video conference (vidcon) dengan Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang dilaksanakan pada Senin (06/04/2020) dengan narasumber Sulastio dari Tenaga Ahli Bawaslu RI dan Arbain dari Indonesia Parliamentary Center (IPC). Vidcon ini langsung dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar. Dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti kegiatan ini adalah Indrawan Susilo Prabowoadi selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Firdinan Islami selaku Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Takwin Saleh selaku Kepala Bagian P3SH (Penindakan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum), dan 1 (satu) staf Divisi Humas.



* **Menyambut HUT Bawaslu ke-12, Bawaslu Kepri Lakukan Donor Darah**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Kantor PMI Provinsi Kepulauan Riau pada hari Rabu (08/04/2020). Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun Bawaslu yang ke-12.

Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kota Tanjungpinang, dan Bawaslu Kabupaten Bintan. Kegiatan donor darah ini merupakan hasil kerjasama antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan PMI Provinsi Kepulauan Riau.



* **Dirgahayu Bawaslu ke-12**

Bawaslu memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 12 secara serentak dengan mengusung tema “Bangun Solidaritas Kebangsaan Melawan Covid-19”, Kamis (9/4/2020) di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Dalam rangka hari jadinya ke - 12 tersebut, Bawaslu melakukan kegiatan aksi sosial penyerahan bantuan Sembako kepada masyarakat, pencaanangan gerakan penggunaan masker (non medis), dan menggelar aksi donor darah di seluruh Indonesia. Hal ini sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan akibat musibah pandemi virus Corona.



* **Launching SKPP Daring, Bawaslu Sebarkan Virus-Virus Pengawasan**

Bawaslu RI melakukan launching Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring bertepatan dengan HUT Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) yang ke-12. SKPP Daring ini merupakan program inovasi baru yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menjawab tantangan pengawasan partisipatif dalam masa pandemi Covid-19.



* **Bawaslu Kepri Gelar Vidcon Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Natuna**

Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Riau menggelar supervisi bersama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Natuna melalui *video conference* (vidcon). Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Riau memimpin jalannya rapat yang dilaksanakan pada hari Sabtu (11/04/2020). Agenda rapat yaitu membahas penentuan dasar hukum waktu untuk penetapan pasangan calon.

GAKKUMDU
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU



* **Rakor Divisi Humas dan Pengawasan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota via Vidcon**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau melakukan *video conference* (vidcon) dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka rapat koordinasi pengawasan dan humas yang dilaksanakan pada Selasa (14/04/2020). Rapat ini dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi dan Koordinator Divisi Pengawasan. Dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

dihadiri oleh Kabag Pengawasan & Humas dan Kabag P3SH (Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum) beserta staf.



* **Kasek Bawaslu Kepri Gelar Rakor Via Vidcon**

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi dengan pejabat struktural beserta staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau via *video conference* (vidcon) yang dilaksanakan pada Rabu (15/04/2020). Rapat ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yunius, S.E., M.Si.



* **Rapat Koordinasi Bawaslu Kepri dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Vidcon**

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau mengikuti rapat koordinasi melalui *video conference* (vidcon) yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis (16/04/2020) dan Jumat (17/04/2020). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yunius, S.E., M.Si dan dihadiri oleh Firdinan Islami selaku Kepala Bagian Pengawasan & Humas, Takwin Saleh selaku Kepala Bagian P3SH (Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, & Hukum), Ridwan selaku Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Zulfahmi selaku Kepala Sub Bagian SDMU (Sumber Daya Manusia & Umum), Siska Ernida Wati selaku Kepala Sub Bagian PKB (Perencanaan, Keuangan, & Barang Milik Negara), Rofi Fardial selaku Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa & Hukum, Ade Irfan Santoso selaku Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data & Informasi, dan Inike Desy Kristianti DKS selaku Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat & Hubungan Antar Lembaga. Dari Bawaslu Kabupaten/Kota, kegiatan vidcon ini dihadiri oleh Koordinator Sekretariat, Bendahara, beserta jajaran staf. Pelaksanaan vidcon ini tetap dengan memperhatikan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga jarak (*physical distancing*) dan menggunakan masker.



* **Sentra Gakkumdu Kepri Gelar Koordinasi Melalui Video Conference**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan *video conference* (vidon) bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka rapat koordinasi kesiapan Sentra Gakkumdu dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada Rabu 22 April 2020. Rapat dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sjahri Papene, SH., MH. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur kejaksaan dan kepolisian.



* **Bawaslu Kepri Lakukan Vidcon Sosialisasi Perbawaslu 2 Tahun 2020**

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengadakan vidcon sosialisasi Perbawaslu 2 tahun 2020 bersama dengan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal (28/04/2020) pukul 09.00 WIB. Vidcon ini membahas terkait perubahan yang terjadi pada peraturan penyelesaian sengketa pemilihan yang sebelumnya menggunakan Perbawaslu 15 tahun 2017 dalam menghadapi Pilkada tahun 2020. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Rahmat Bagja.



* **Bawaslu Kepri Tetap Eksis di Masa Pandemi Covid-19**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring dalam masa Pandemi Covid-19 ini. Kegiatan ini akan berjalan mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 30 Juni 2020. Rapat Persiapan Pelaksanaan SKPP Daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan peserta, dan seluruh panitia pelaksana SKPP daring dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri yang dilaksanakan pada 28 April 2020. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Koordinator Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I.



* **Kasek Bawaslu Kepri Ikuti Kegiatan Pisah Purnabakti Kasek Bawaslu DIY Melalui Vidcon**

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yunius, S.E., M.Si mengikuti video conference (vidcon) dalam rangka acara pisah purnabakti Kepala Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Mujiono, S.H.,MM. Acara ini dihadiri oleh Dr. Gunawan Suswantoro selaku Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ir. D. Adhi Santoso, M.M selaku Kepala Biro Administrasi Bawaslu RI, beserta seluruh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan juga dihadiri oleh beberapa Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi pada periode sebelumnya yang dilaksanakan pada Jumat (01/05/2020).



* **Pembukaan SKPP Daring Wilayah Kepulauan Riau**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara resmi membuka kegiatan SKPP Daring Tahun 2020 pada Senin (4/5/2020). Ditengah pandemi Covid-19, pembukaan dilakukan secara streaming di channel youtube resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yaitu Humas dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin, S. Th. I., M. Si, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Sekretariat dan jajaran struktural Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta Ketua dan Anggota beserta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan juga diikuti seluruh peserta

yang sudah dinyatakan lolos seleksi SKPP Daring Tahun 2020 dan dari eksternal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



* **Apa Itu SKPP Daring?**

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) bukanlah hal baru yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dikarenakan ini sudah yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh Bawaslu. Namun SKPP Daring ini adalah program inovasi baru dari sisi cara pelaksanaan dalam memberikan pendidikan kepemiluan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan yaitu dengan menggunakan sistem online. Program ini sekaligus untuk menjawab tantangan di masa pandemi Covid-19, dimana tidak dimungkinkan untuk melakukan pertemuan tatap muka secara langsung. SKPP Daring ini adalah salah satu program Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan, program sekolah kader pengawas partisipatif daring ini juga dilakukan oleh Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya terkait dengan kepemiluan.



* **Bawaslu Kepri Gelar Pembukaan Rangkaian Kegiatan Vidcon Divisi Hukum, Humas & Datin se-Provinsi Kepri**

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, SH, LL.M, P.hD membuka rangkaian kegiatan Divisi Hukum, Humas dan Datin se-Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (05/05/2020). Kegiatan yang

dilakukan melalui video conference (vidcon) ini dihadiri oleh Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yunius, SE, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, pejabat struktural di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa beserta staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini membahas Penguatan Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).



* **Bawaslu Kepri Lakukan Pelatihan Advokasi Hukum Ke Bawaslu Kabupaten/Kota**

Sebagai bagian rangkaian kegiatan Video Conference (vidcon) yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19, Divisi Hukum, Humas dan Data & Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan pelatihan advokasi hukum ke Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (06/05/2020). Pada kegiatan yang mengundang Koordinator Divisi Hukum beserta dengan staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menghadirkan 2 (dua) orang narasumber yaitu Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kepri

dan Witra Evelin Maduma Sinaga, SH, MH selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan Putusan dan Bantuan Hukum Bawaslu RI.



* **Bawaslu Kepri Gelar Diskusi Pentingnya Pemahaman SOP PPID**

Selama pandemi Covid-19, Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menggelar berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan kehumasan. Salah satu kegiatan kehumasan yaitu kegiatan pemahaman tentang SOP PPID yang dilaksanakan pada Jumat (08/05/2020). Kegiatan ini dihadiri oleh Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Firdinan Islami, S.STP., M.Si selaku Kepala Bagian Pengawasan & Humas, Takwin Saleh, SH selaku Kepala Bagian P3SH (Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum), Inike Desy Kristianti DKS, S.Kom selaku Plt. Kasubbag Humas & Hubal, tim Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi, Koordinator Sekretariat beserta tim pengelola PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Pada kegiatan ini juga menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Sulastio selaku Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI dan Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Si, M.Si selaku Direktur UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.





* **Cegah Penyebaran Covid-19, Bawaslu Kepri Kembali Lakukan Penyemprotan Disinfektan**

Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19, berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini, Minggu (10/05/2020) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kembali melakukan penyemprotan disinfektan dengan dibantu oleh 7 (tujuh) petugas dari Koperasi Vekto Bahtera Samudera, KKP Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan penyemprotan tersebut langsung diawasi oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Firdinan Islami, S.STP., M.Si.



* **Pertajam Kemampuan Menulis, Bawaslu Kepri Lakukan Vidcon Strategi Dan Kiat Menulis Karya Tulis Hukum**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan menulis karya tulis khususnya dalam bidang hukum, Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau lakukan kegiatan vidcon Strategi dan Kiat Menulis Karya Tulis Hukum kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Dr. Bachtiar Baetal, SH, MH selaku Tenaga Ahli Bagian Hukum Bawaslu RI dan Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



* **Bawaslu RI Gelar Rapat Persiapan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dalam Bantuan & Pendampingan Hukum**

Rapat daring persiapan kegiatan peningkatan kapasitas dalam bantuan dan pendampingan hukum ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, SH, L.LM, PhD , Kabag Hukum Bawaslu RI Agung Bagus Gede Bayu Indraatmaja, SH, MH, Kasubag Pemantauan Putusan dan Bantuan Hukum Bawaslu RI Witra Evelin Maduma Sinaga, SH, MH, Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Bagian Hukum Bawaslu RI serta turut hadir Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.



* **Tingkatkan Kemampuan Analisis Hukum, Bawaslu Kepri Lakukan Pelatihan *Legal Opinion***

Sebagai rangkaian akhir kegiatan bagian hukum, Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau lakukan pelatihan legal opinion kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kegiatan ini hadir sebagai narasumber Dr. Bachtiar Baetal, SH, MH selaku Tenaga Ahli Bagian Hukum Bawaslu Kepri dan Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH selaku moderator dalam kegiatan ini.



* **Bawaslu Kepri Jalani Pelaksanaan Rapid Test**

Pemerintah terus berusaha keras untuk menekan penularan virus corona agar tidak meluas, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melaksanakan tes virus corona dengan menggunakan rapid test. Begitupun juga dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan rapid test pada Senin (11/05/2020). Pelaksanaan rapid test tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



* **Tingkatkan Peran Kehumasan, Bawaslu Kepri Gelar Diskusi Teknik Pengambilan Berita & Fotografi**

Memasuki kegiatan kedua kehumasan selama pandemi Covid-19 ini, Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan kelas daring terkait teknik penulisan berita, fotografi, dan videografi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi zoom pada Rabu (13/05/2020). Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Firdinan Islami, S.STP., M.Si selaku Kepala Bagian Pengawasan & Humas, Takwin Saleh, SH selaku Kepala Bagian P3SH (Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum), Inike Desy Kristianti DKS, S.Kom selaku Plt. Kasubbag Humas & Hubal, Ade Irfan Santoso selaku Plt. Kasubbag Pengawasan, Akreditasi Pemantau, dan Data & Informasi, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi, Koordinator Sekretariat beserta staf Humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Pada kegiatan ini juga menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Nikolas Panama, SH., M.Pd selaku Pewarta LKBN Antara dan Andri Mediansyah selaku Pewarta foto Inilah Kepri.





* **Bawaslu RI Lakukan Rapat Persiapan Kegiatan Analisis Rancangan Undang-Undang Pemilu**

Divisi Hukum Bawaslu RI kembali menggelar rapat melalui video conference (Vidcon) dengan Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia untuk persiapan kegiatan analisis RUU Pemilu. Dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, SH, L.LM, PhD ini turut hadir Kabag Hukum Bawaslu RI Agung Bagus Gede Indratmaja, SH, MH, Kasubbag Analisis dan Dokumentasi Hukum Threes Angeline Tampubolon, Tenaga Ahli Bagian Hukum Dr. Bachtiar Baetal, SH, MH, serta pejabat struktural di bagian hukum Bawaslu RI.



* **Bawaslu Kepri Gelar Rapat Tindak Lanjut Pembahasan PPID**

Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih menghantui dunia termasuk Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau masih tetap menjalankan tugasnya. Salah satu kegiatan yang dilakukannya yaitu Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap melaksanakan kegiatan kehumasan yang sudah memasuki kegiatan ketiga dengan membahas tentang pemahaman PPID dan PPID online. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Firdinan Islami, S.STP., M.Si selaku Kepala Bagian Pengawasan & Humas dan Takwin Saleh, SH selaku

Kepala Bagian P3SH (Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum). Pada kegiatan ini juga menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Si selaku Direktur UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Haryo Sudrajat selaku Kasubbag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI.



* **Bawaslu Kepri Menggelar Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis (rakernis) penanganan pelanggaran untuk Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada Kamis (14/05/2020). Rakernis dilakukan melalui video conference (vidcon) dan dihadiri oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH selaku Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Takwin Saleh, SH selaku Kepala Bagian P3SH (Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum) dengan mengusung tema "Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pada Saat Penundaan Tahapan Pilkada Tahun 2020". Peserta rakernis tersebut terdiri dari Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota beserta staf sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.



* **Bawaslu Kepri Gelar Rakor Dalam Rangka Meningkatkan Popularitas Media Sosial**

Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan terakhir kehumasan selama masa pandemi virus Covid-19 dengan mengangkat tema “Strategi dan Kiat Meningkatkan Rating dan Popularitas Media Sosial” melalui video conference (vidcon). Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Firdinan Islami, S.STP., M.Si selaku Kepala Bagian Pengawasan & Humas, Takwin Saleh, SH selaku Kepala Bagian P3SH (Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum), Inike Desy Kristianti DKS, S.Kom selaku Plt. Kasubbag Humas & Hubal, Ade Irfan Santoso, SH selaku Plt. Kasubbag Pengawasan, Akreditasi Pemantau, dan Data & Informasi, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi, Koordinator Sekretariat beserta staf Humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Pada kegiatan ini juga menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Sulastio selaku Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI dan Baguz Dwi Pradana selaku Staf Bagian Humas dan Hubal Bawaslu RI.





* **Bawaslu RI Laksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bantuan dan Pendampingan Hukum Gelombang I**

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bantuan dan pendampingan hukum gelombang I sukses digelar Bawaslu RI bersama 10 (sepuluh) Bawaslu Provinsi termasuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kegiatan yang dibuka oleh Fritz Edward Siregar, SH, LLM, P.hD pada hari Jumat (15/05/2020) tampil sebagai fasilitator selama berlangsungnya kegiatan oleh Kolase Konstitusi yang diketuai oleh Veri Junaidi.



* **M.Afandi, Staf Hukum Bawaslu Kepri , Jadi Peserta Terbaik Pelatihan Bantuan dan Pendampingan Hukum**

Sebagai salah satu bentuk apresiasi selama pelatihan yang dilakukan selama 6 (enam) hari berturut-turut mulai dari hari Jumat sampai dengan Rabu (15-20 Mei 2020), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengumumkan 3 (tiga) peserta terbaik dari 10 (sepuluh) provinsi yang tergabung dalam gelombang I. Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data & Informasi Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, SH, LLM, P.hD berkesempatan secara langsung mengumumkan (tiga) peserta terbaik pelatihan. Staf Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Afandi, SH menjadi salah satu peserta terbaik dengan mendapatkan nilai secara keseluruhan sebanyak 81.



* **Peringatan Nuzulul Qur'an dan Khataman Tadarus Pengawasan Pemilu Tahun 1441 H**

Bawaslu RI mengadakan Peringatan Nuzulul Qur'an dan Khataman Tadarus Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan pada hari Rabu (20/05/2020). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan Sekretariat Bawaslu RI serta diikuti juga oleh jajaran pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para pengawas pemilu dimasa pandemi Covid-19. Kegiatan dibuka dengan tadarus Qur'an dan dilanjutkan dengan arahan pimpinan terkait arah dan kebijakan kerja-kerja pengawasan setelah ditundanya tahapan pilkada tahun 2020 oleh karena pandemi Covid-19 ini.



* **Forum Diskusi Penguatan Kapasitas Hubungan Antar Lembaga di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Vidcon**

Kegiatan penguatan kapasitas Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Selasa (19/05/2020) melalui video conference (vidcon). Kegiatan ini membahas dua tema yang dibagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu sesi pagi dan sesi siang. Sesi pagi membahas tentang upaya dan kiat-kiat Bawaslu dalam meningkatkan

kinerja hubungan antar lembaga lain pada masa pandemi Covid-19 dengan narasumber Deytri Aritonang selaku Tim Asistensi Koordinator Pengawasan Bawaslu RI dan R. Alief Sudewo, S.Sos., M.Si selaku Kasubbag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI. Sesi siang dengan tema Optimisme dan Pesimisme Hajatan Demokrasi Lokal di Provinsi Kepulauan Riau di tengah pandemi Covid-19 dengan narasumber Priyo Handoko, S.A.P., MA selaku anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau. Forum diskusi ini bertujuan bagaimana dimasa pandemi Covid-19, Bawaslu dapat memaksimalkan kinerja hubungan antar lembaga lain dengan menerapkan kiat-kiat yang bersifat efisiensi serta mendengar saran dan masukan dari sivitas akademika yang ada di Kepulauan Riau sebagai bahan pertimbangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam menerapkan dan meningkatkan kerja-kerja pengawasan dimasa pandemi Covid-19.



* **Penguatan Kapasitas Divisi Pengawasan Bawaslu Kepri Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Forum Diskusi**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas Divisi Pengawasan pada masa pandemi Covid-19 melalui forum diskusi video conference (vidcon) pada hari Senin (18/05/2020) di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti juga oleh anggota dan staf Bawaslu Kabupaten/Kota Divisi Pengawasan se-Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Yessi Yuniuss, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



* **Bawaslu Kepri Berbagi Takjil Menjelang Buka Puasa**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membagikan takjil di bulan Ramadhan ini. Pembagian takjil menjelang waktu berbuka puasa diberikan kepada beberapa pengendara yang lalu lalang di sepanjang Jalan WR Supratman, Kota Tanjungpinang (depan Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau) yang dilaksanakan pada hari Rabu (20/05/2020) bertepatan dengan 27 Ramadhan 1441 H. Pembagian takjil ini juga langsung dibagikan oleh Yessi Yunius, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran staf. Kegiatan aksi berbagi takjil kepada masyarakat ini merupakan wujud aksi sosial yang dilakukan pada bulan Ramadhan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang bersamaan dengan kondisi pandemi Covid-19.



* **Bawaslu Kepri Ikuti Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP Via Daring**

Bawaslu RI melaksanakan Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP melalui daring yang dilaksanakan pada hari Selasa (26/05/2020). Kegiatan ini diikuti oleh Said Abdullah Dahlawi, ST selaku Koordinator Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yuniuss, SE, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Zul Fahmi, SE selaku Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Umum, Siska Ernida Wati, S.Si selaku Kasubbag PKB (Perencanaan, Keuangan, & BMN), dan staf terkait. Di kegiatan ini hadir sebagai narasumber yaitu Ferdinand Eskol Tiar Sirait selaku Kepala Biro H2PI Bawaslu RI dan Vepty Puput Purba selaku Kasubbag Pemeriksa Kinerja Bawaslu RI.



* **Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh Bawaslu RI**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengikuti kegiatan rapat daring sosialisasi pengendalian gratifikasi yang digelar oleh Bawaslu RI pada hari Rabu (27/05/2020). Dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan ini dihadiri oleh Said Abdullah Dahlawi, ST selaku Koordinator Divisi SDM & Organisasi, Yessi Yuniuss, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Firdinan Islami, S.STP, M.Si selaku Kabag Pengawasan & Humas, Zul Fahmi, SE selaku Kasubbag SDM & Umum, Siska Ernida Wati, S.Si selaku Kasubbag PKB (Perencanaan, Keuangan, & BMN), Ade Irfan Santosa, SH selaku Plt. Kasubbag Pengawasan, Akreditasi Pemantau, &

Datin, dan Inike Desy Kristianti DKS, S. Kom selaku Plt. Kasubbag Humas & Hubal. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) narasumber yaitu Pirogok selaku Kabag Pengawasan Internal Bawaslu RI dan Agustin Rafika Sari selaku Kasubbag Pemeriksa Keuangan Bawaslu RI.



* **Bawaslu Kepri Jalani Rapid Test Kedua**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau memastikan kesehatan di masa pandemi virus corona (Covid-19) dengan melakukan rapid test gelombang kedua yang dilaksanakan pada hari Rabu (27/05/2020).



* **Halal Bihalal Pengawas Pemilu se-Indonesia**

Bawaslu RI menggelar silaturahmi dan halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1441 H secara virtual melalui *video conference* (vidcon) bersama jajarannya. Melalui vidcon dari Kantor Bawaslu RI, pimpinan Bawaslu RI menjalin silaturahmi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.



* **Halal Bihalal Bersama Sahabat SDM dan Organisasi se-Indonesia**

Acara halal bihalal ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, S.H., M.H. yang juga sebagai Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu RI dan juga serta pembicara dalam halal bihalal secara nasional tersebut. Said Abdullah Dahlawi, ST selaku Koordinator Divisi SDM & Organisasi juga turut menghadiri kegiatan halal bihalal ini.



* **Presiden Jokowi : Bersyukur Bahwa Pancasila Tetap Menjadi Bintang Penjuru**

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2020 ini berbeda, karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Peringatan ini yang biasanya dilakukan dengan pelaksanaan upacara, akan tetapi karena pandemi Covid-19, maka dilaksanakan secara daring melalui *video conference* (vidcon).





* **Penyemprotan Disinfektan Tahap Ketiga**

Meski sebelumnya telah dilakukan penyemprotan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau kembali melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan guna mencegah meluasnya penyebaran virus Corona (Covid-19). Penyemprotan ini dilaksanakan di area lingkungan kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Zul Fahmi, SE selaku Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum.



* **Idris : Minat Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Proses Demokrasi Berjalan Baik**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan diskusi online SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) Daring (Dalam Jaringan) Tahun 2020 dengan mengangkat tema tahapan Pemilu dan Pilkada, regulasi Pemilu dan Pilkada dan Kerawanan Pemilu dan Pilkada. Kegiatan ini diikuti oleh peserta SKPP Daring Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang telah lolos tahapan sebelumnya yaitu pembelajaran melalui Audio Visual dan Diskusi dalam WA Group. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pendalaman materi kepada peserta SKPP Daring yang telah disampaikan melalui media pembelajaran audio visual.



* **Kajian Hukum Bawaslu Provinsi Akan Menjadi Masukan Bawaslu Terhadap RUU Pemilu**

Rapat yang dibuka langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, SH, LL.M, PhD berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) jam yang dimulai Pukul 13.00 WIB. Turut hadir dalam rapat ini Agung Bagus Gede Indratmaja, SH, MH selaku Kabag Hukum Bawaslu RI, Threes Angeline Tampubolon selaku Kasubag Analisis Dan Dokumentasi Hukum Bawaslu RI, Dr. Bachtiar Baetal, SH, MH selaku Tenaga Ahli Bawaslu RI, Tim Asistensi Bagian Hukum Bawaslu Ri, staf bagian hukum dan hadir sebagai peserta 10 (sepuluh) Bawaslu Provinsi terundang yang mengerjakan tugas terkait kelembagaan serta tugas dan kewenangan Bawaslu dalam RUU Pemilu termasuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



* **Diskusi Online SKPP 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan diskusi online SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) Daring (Dalam Jaringan) Tahun

2020 dengan tema mekanisme pengawasan Pemilu dan Pilkada, mekanisme penanganan pelanggaran serta tema mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuan kegiatan yang dilaksanakan agar kader SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) dapat secara langsung berdiskusi dengan pemateri agar para kader mendapat pemahaman yang lebih mendalam seputar pengawasan Pemilu dan Pilkada.



* **Pelaksanaan Pilkada Menunggu KPU**

Persiapan dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 diantaranya menunggu beberapa peraturan KPU guna pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, Kebutuhan Anggaran untuk Restrukturisasi, ketersediaan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Pengawas Ad Hoc dan pengaktifan kembali jajaran Pengawas Ad Hoc.



* **Kunjungan Disperindag Kepri Ke Bawaslu Kepri**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima kunjungan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Disperindag Provinsi

Kepulauan Riau Ir. H. Burhanuddin, ST., M.Si beserta Kasubbag dan staf pada hari Kamis (04/06/2020) bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kunjungan tersebut untuk berkonsultasi terkait dengan penyaluran bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.



* **Rapat Daring Sekjen Bawaslu RI Bersama Bawaslu Kepri, Pasca RDP Terkait Pilkada Serentak 2020**

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI mengadakan Rapat Daring bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang dipandu secara langsung oleh Kepala Biro Administrasi Bawaslu RI, D. Adhi Santoso membahas terkait Pendalaman Rincian Kegiatan Pilkada Yang Bersumber Dari APBD Pasca Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, Bawaslu, KPU dan DKPP. Yessi Yunius, SE, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau turut hadir dalam rapat daring yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Dr. Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Dr. La Bayoni, S.IP, M.Si, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Bawaslu RI, Drs. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, MH., ME, Kepala Biro Administrasi Bawaslu RI, Ir. D. Adhi Santoso, MM, dan Kasubbag Program & Anggaran Bawaslu RI, Bashory.



* **Sidang Perbaikan Permohonan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Via Daring**

Dalam sidang yang dibuka pukul 10.30 WIB, hadir 3 (tiga) pemohon yaitu Tiuridah Silitonga, ST, MM selaku Pemohon I, Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH selaku Pemohon II dan Mohammad Fadli, SH selaku Pemohon IV. Sementara Nurhidayat, S.Sos selaku Pemohon III tidak dapat hadir karena disaat yang bersamaan harus mengawal persiapan dimulainya tahapan Pilkada di Kabupaten Karimun.



* **Bawaslu dan Polda Kepri Bersinergi Sukseskan Pilkada 2020**

Bawaslu Provinsi Kepri berkunjung ke Mapolda Kepri untuk melakukan audiensi dengan Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si Rabu (10/06/2020). Turut hadir sejumlah pejabat utama Polda Kepri yakni Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Darmawan, M.Hum, Dir Intelkam Kombes Pol Moch Rodjak Sulaeli, Dir Krimum Kombes Pol Arie Dharmanto, S. Sos., SIK dan Kabid Humas Kombes Pol Harry Goldenhart. S, SIK., M.Si. Audiensi ini dilakukan untuk membahas secara langsung persiapan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepri yang hampir dipastikan terlaksana pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.



* **Penandatanganan MoU Antara Bawaslu Kepri dengan UMRH**

Penandatanganan MoU pengawasan partisipatif ini dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sjahri Papene,SH.,MH dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi.,DEA yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. MoU ini sebagai payung kerjasama program jangka panjang dari kedua belah pihak.



* **Pilkada Dilaksanakan Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat**

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, H.T.S. Arif Fadillah, pada *Video Conference* (vidcon) Rapat Pembahasan Persiapan Pilkada bersama Bupati/Walikota, KPU & Bawaslu se-Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama Lantai IV, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda dunia sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan belum dapat diprediksi kapan berakhir, dan berdampak besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat khususnya Kepulauan Riau, termasuk berdampak pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang.





* **Sosialisasi Perbawaslu Tata Kerja Dan Pola Hubungan Oleh Bawaslu RI**

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai jam 11.00 WIB ini dihadiri oleh Kabag Bagian Hukum Bawaslu RI, Kasubbag Perundang-undangan Bawaslu RI, Tenaga Ahli Bagian Hukum Bawaslu RI, Tim Asistensi Bawaslu RI, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data & Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, seluruh pejabat struktural di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, seluruh Koordinator Divisi Hukum/HPPS Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Provinsi Kepulauan Riau, serta staf bagian hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Sosialisasi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan di Lingkungan Bawaslu dan jajarannya ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman terkait penguatan kelembagaan Bawaslu kepada jajaran Bawaslu, khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.



* **Petakan Permasalahan Pengawasan Tahapan Pemilihan, Bawaslu RI Lakukan Sosialisasi**

Kegiatan sosialisasi ini dimulai pukul 15.00 WIB yang dibuka langsung oleh Kabag Hukum Bawaslu RI dengan menghadirkan Tenaga Ahli Divisi Hukum

Bawaslu RI, Kasubbag Administrasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu RI dan Tim Asistensi Bawaslu RI. Dalam pembukaannya Kabag Hukum Bawaslu RI, Agung Bagus Gede Indratmaja, SH, MH menyampaikan hal-hal yang harus disiapkan di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.



* **Bawaslu Kepri Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI**

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI ini mengundang 4 narasumber yaitu Veri Junaidi selaku Ketua KoDe Inisiatif, August Mellaz selaku Direktur Eksekutif SPD, Manimbang Kahariady selaku Sekjen MN Kahmi dan Yusfitriadi selaku Direktur DEEP Indonesia forum diskusi ini mengumpulkan ide-ide agar nantinya dapat terakomodir pada regulasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam kondisi Covid-19 saat ini.



* **KASN Perkuat Pengawasan Netralitas ASN**

Dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan berintegritas, Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalin kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bentuk kerja sama kemitraan strategis ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak 2020.



* **Konsolidasi Pilkada Serentak Pengawas se-Kepulauan Riau**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Konsolidasi Pilkada Serentak bagi jajaran Pengawas se-Provinsi Kepulauan Riau melalui daring yang dilaksanakan pada hari Rabu (17/6/2020). Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Jajaran Pejabat Struktural dilingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



* **Bawaslu Mulai Menyusun TOT Bimtek Bagi Panwascam dan PKD**

Bawaslu RI mulai merancang dan menyusun pedoman TOT (*Training of Trainers*) bimbingan teknis bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melalui rapat secara daring bersama Ketua Bawaslu RI dan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi se-Indonesia pada hari Rabu (17/6/2020). Rapat tersebut mendengarkan pendapat dari setiap provinsi dalam menentukan substansi materi apa saja yang akan disampaikan

oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai bahan guna memberikan peningkatan Kapasitas SDM di jajaran pengawas *ad hoc*.



* **Persiapan Penilaian PIPK, Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Tata Cara Penilaian PIPK**

Bawaslu RI melaksanakan sosialisasi tata cara Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2020 secara daring melalui aplikasi zoom yang dilaksanakan pada hari Kamis (18/06/2020). Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Said Abdullah Dahlawi, ST selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yunius, SE, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Siska Ernida Wati, S.Si selaku Kasubbag PKB (Perencanaan, Keuangan dan BMN), serta staf keuangan dan perencanaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



* **Penguatan Kapasitas Divisi Pengawasan Bawaslu Kepri Melalui Vidcon**

Bawaslu Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga melalui vidcon (*video conference*) aplikasi zoom bersama seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada hari Kamis (18/06/2020). Kegiatan penguatan kapasitas mengusung tema mekanisme dan alat kerja pengawasan verifikasi faktual dan tahapan pencocokan penelitian daftar pemilih.



* **Idris : LHP Form A Bukan Saja Untuk Para Pimpinan Tetapi Juga Semua Pengawas Ditiap Tingkatan**

Bawaslu Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga yang dilaksanakan melalui video conference aplikasi Zoom bersama seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau dengan mengusung tema tata cara pengisian laporan hasil pengawasan (LHP formulir model A) manual dan *online*.



* **Bawaslu Kepri Ikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 41 Tahun 2020**

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 yang dilakukan secara daring pada hari Sabtu (20/6/2020). Sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, hadir dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yaitu Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Said Abdullah Dahlawi, STselaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Yessi Yunius, SE, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Siska Ernida Wati, S.Si selaku Kasubbag PKB (Perencanaan, Keuangan dan BMN) , serta staf perencanaan dan keuangan.



* **FGD Penyusunan Petunjuk Teknis Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020**

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengikuti rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan petunjuk teknis Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Juni 2020 dengan tema “Penerimaan Permohonan dan Registrasi” dan tanggal 19 Juni 2020 dengan tema “Juknis Pelaksanaan Musyawarah Terbuka dan Tertutup”. Kegiatan yang diikuti seluruh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu se-Provinsi Indonesia membahas petunjuk teknis dari Perbawaslu 2 Tahun 2020 untuk mempersiapkan pelaksanaan penyelesaian sengketa pada tahapan pilkada 2020. Pembahasan di FGD ini menitikberatkan bagaimana petunjuk teknis ini mengakomodir didalam 2 kondisi yaitu Normal dan New Normal.



* **Bimtek Pembuatan Notulen dan Risalah**

Divisi Penyelesaian Sengketa Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Notulen dan Risalah melalui daring yang diikuti oleh Ketua dan Anggota serta staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada hari Senin (22/06/2020). Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas khususnya staf yang akan menjadi notulen dan perisalah pada saat musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan. Kegiatan yang diisi oleh 3 (tiga) narasumber tersebut yaitu Purnomo selaku Tenaga Ahli Bawaslu RI, Dayanto selaku Tim Asistensi Bawaslu RI, dan Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini dibuka oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Rahmat Bagja.



* **Sekda Provinsi Kepri Melakukan Kunjungan ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepri**

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, H. T.S Arif Fadillah mengunjungi Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada hari Rabu (24/6/2020). Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kesiapan Bawaslu dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.



* **Bawaslu RI Lakukan Sosialisasi, Evaluasi Perbawaslu Dan SOP Bantuan Hukum**

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kabag Hukum Bawaslu RI Agung Bagus Gede Indratmaja, SH, MH. Dalam arahan dan pemberian materinya Agung menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka mensosialisasikan

Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 sekaligus menyampaikan SOP Bantuan Hukum.



* **Penandatanganan MoU Bersama 3 Perguruan Tinggi di Tanjungpinang**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bersama 3 (tiga) perguruan tinggi yang ada di Tanjungpinang menandatangani nota kesepahaman (Mou) tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Ketiga perguruan tinggi yang menandatangani MoU adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul 'Ulum Tanjungpinang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Tanjungpinang.



* **Bimtek Penyusunan Modul Panwascam Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Saat Pandemi Covid-19**

Bawaslu mulai merancang dan menyusun modul Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melalui rapat secara daring bersama Ketua Bawaslu RI dan Koordinator Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat (26/06/2020). Rapat ini mendengarkan pendapat dari setiap Provinsi tentang penyusunan modul yang sudah dirancang dimana ada 2 (dua) metode yaitu melalui mode daring yang disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19 ini dan metode tatap muka yang tetap memahami prosedur pada saat kondisi Pandemi Covid-19 dalam mengerjakan tugasnya oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.



2. Penerbitan Siaran Pers

Siaran Pers (*press release*) merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan humas untuk menyampaikan informasi tentang kinerja atau peristiwa kepada publik melalui media. Beberapa siaran pers yang telah di publish oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya:

* **Bawaslu Lakukan *Recruitment* Pengawas TPS**



Siaran pers ini dipublish oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 30 September 2020. Adapun alamat situs / link nya yaitu https://kepri.bawaslu.go.id/index.php?no=288&id=8&module=news_detail

* **Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Paslon Pilkada Serentak Tahun 2020 Periode 26 September – 1 Oktober 2020**

Siaran pers ini dipublish oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 Oktober 2020. Adapun alamat situs / link nya yaitu https://kepri.bawaslu.go.id/index.php?no=290&id=8&module=news_detail

* **Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Paslon Pilkada Serentak Tahun 2020 Periode 7 – 13 Oktober 2020**

Siaran pers ini dipublish oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Oktober 2020. Adapun alamat situs / link nya yaitu https://kepri.bawaslu.go.id/index.php?no=300&id=8&module=news_detail

* **Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Paslon Pilkada Serentak Tahun 2020 Periode 21 – 30 Oktober 2020**



Siaran pers ini dipublish oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 November 2020. Adapun alamat situs / link nya yaitu https://kepri.bawaslu.go.id/index.php?no=306&id=8&module=news_detail

* **Penganiayaan yang dialami oleh Ketua Panwascam Kecamatan Batam Kota Batam**

Siaran pers ini dipublish oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 13 November 2020. Adapun alamat situs / link nya yaitu https://kepri.bawaslu.go.id/index.php?no=310&id=8&module=news_detail

* **Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Paslon Pilkada Serentak Tahun 2020 Periode 26 September – 12 November 2020**

Siaran pers ini dipublish oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 13 November 2020. Adapun alamat situs / link nya yaitu https://kepri.bawaslu.go.id/index.php?no=311&id=8&module=news_detail

* **Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Paslon Pilkada Serentak Tahun 2020 Periode 26 September – 23 November 2020**

Siaran pers ini dipublish oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 November 2020. Adapun alamat situs / link nya yaitu https://kepri.bawaslu.go.id/index.php?no=313&id=8&module=news_detail

3. Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan selama masa pandemi Covid-19

* **Pemahaman Tentang SOP PPID**

Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Jumat (08/05/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Sulastio, Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI dan Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Si, M.Si, Direktur UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, tim PPID Bawaslu Provinsi Kepri, Koordinator Sekretariat beserta tim pengelola PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri.



* **Pembuatan Penulisan Berita, Fotografi dan Videografi**

Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Rabu (13/05/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu, Nikolas Panama, SH., M.Pd, Pewarta LKBN Antara dan Andri Mediansyah, Fotografer Inilah Kepri. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.



* **Pemahaman Tentang PPID dan PPID Online**

Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Kamis (14/05/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Si, M.Si, Direktur UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Haryo Sudrajat, Kasubbag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.



- * **Strategi dan Kiat Meningkatkan Rating dan Popularitas Media Sosial**
Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Jumat (15/05/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Sulastio, Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI dan Baguz Dwi Pradana, Staf Bagian Humas dan Hubal Bawaslu RI. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.





* **Media Gathering 2020, Bersama Media Membangun Sinergi Berkualitas**

Dilaksanakan secara tatap muka pada hari Rabu (01/07/2020). Kegiatan yang bersifat diskusi dan sharing ini dihadiri rekan-rekan jurnalis dari AJI, PWI, IWO, SMSI, IJTI, RRI dan Antara Kepri.



* **Rapat Dalam Kantor Penguatan Kapasitas Kehumasan Dalam Membuat Desain Grafis Menggunakan Photoshop**

Dilaksanakan secara tatap muka hari Selasa (18/08/2020). Menghadirkan narasumber praktisi desain Kepri, Tommy Surya Adijaya. Peserta kegiatan ini adalah Anggota, Kasek dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri.





* **Penguatan Kapasitas Kehumasan – Peran Web & Media Sosial dalam Pilkada Tahun 2020**

Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Kamis (17/09/2020). Narasumber kegiatan ini yaitu Sulastio Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI, Haryo Sudrajat Kasubbag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI, dan Septiaji Eko Nugroho Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.



* **Peningkatan Fungsi PPID di Era Keterbukaan Informasi**

Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Kamis (17/09/2020). Narasumber kegiatan ini yaitu Haryo Sudrajat Kasubbag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi

Kepri, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-
Provinsi Kepri yang membidangi kehumasan.



* **Penyelesaian Sengketa Informasi**

Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Jumat (18/09/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Sulastio, Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI dan Ferry Muliadi Manalu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang termasuk di dalam struktur PPID.



* **Media Gathering - Peran Strategis Media dalam Mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020**

Dilaksanakan secara tatap muka pada hari Jumat (16/10/2020). Narasumber Media Gathering pada sesi pagi adalah Zakmi, Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan dan Jailani, Ketua AJI Tanjungpinang. Kegiatan yang bersifat diskusi

dan sharing ini dihadiri oleh Kordiv Hukum, Humas dan Datin Indrawan Susilo Prabowoadi, Kordiv Pengawasan dan Hubal Idris, Kordiv Penyelesaian Sengketa Rosnawati beserta awak media dari PWI, AJI, RRI, Mercy FM, Pandawa FM, Onine FM dan Bintang Radio FM.



* **Media Gathering - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19**

Dilaksanakan secara tatap muka pada hari Jumat (16/10/2020). Narasumber Media Gathering pada sesi siang adalah Nikolas Panama dari LKBN Antara. Kegiatan yang bersifat diskusi dan sharing ini dihadiri oleh Kordiv Hukum, Humas dan Datin Indrawan Susilo Prabowoadi, Kordiv Pengawasan dan Hubal Idris beserta awak media IWO dan IJTI.



* **Penguatan Kapasitas Kehumasan - Teknik Pendokumentasian Hasil Kerja Bidang Kehumasan**

Dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada hari Rabu (21/10/2020). Menghadirkan dua narasumber yaitu Ahmad Ali Imron, Kasubbag Humas Bawaslu RI dan Haryo Sudrajat, Kasubbag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri yang termasuk di dalam struktur PPID.



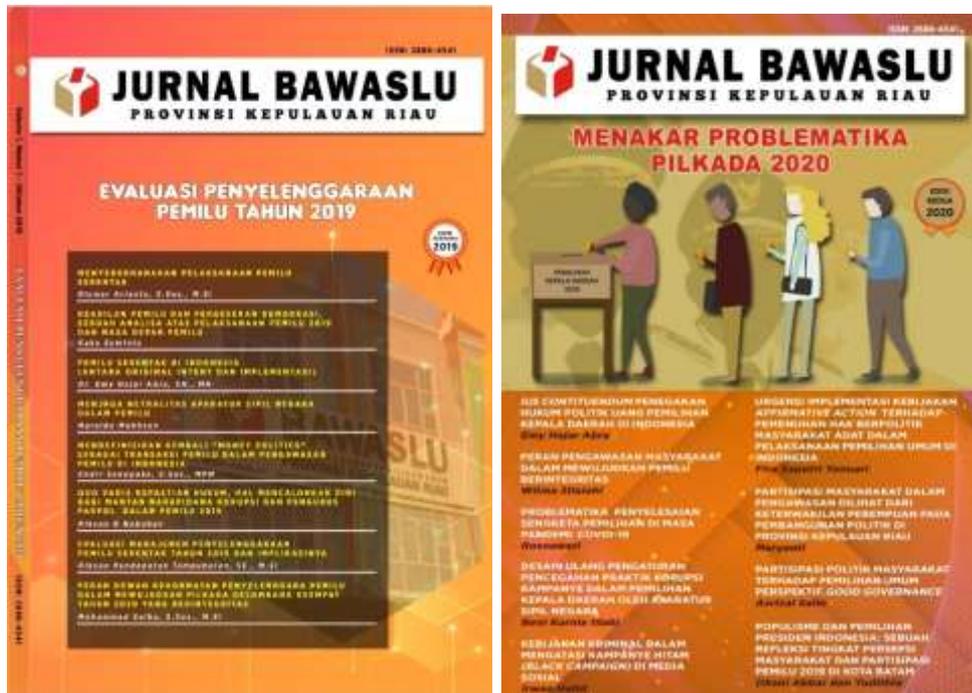
* **Penandatanganan MoU Gugus Tugas Pengawasan Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau**

Dilaksanakan di Batam pada hari Kamis (19/11/2020). Bawaslu Provinsi Kepri melaksanakan penandatanganan MoU bersama KPU Provinsi Kepri, Polda Kepri, Diskominfo Provinsi Kepri, dan KPID Provinsi Kepri.



* **Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan dua Jurnal. Jurnal edisi pertama terbit pada Oktober 2019 dengan tema besar Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Jurnal edisi kedua terbit pada Juli 2020 dengan tema besar Menakar Problematika Pilkada 2020. Jurnal edisi pertama dapat diunduh [disini](#) dan Jurnal edisi kedua dapat diunduh [disini](#).



4. Publikasi

a. Website

Dalam keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki website resmi dan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang membagikan berbagai informasi resmi lembaga. Melalui website resmi dan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dapat melihat dan meminta informasi baik mengenai kepemiluan maupun kelembagaan secara *online* tanpa harus datang langsung ke kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Selain menghemat waktu, juga lebih cepat, efektif dan efisien.





b. Media Sosial

Media sosial saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Perkembangan dunia teknologi yang sudah semakin inovatif di era global telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instragam, Twitter, Line, Facebook, Youtube, dan lain-lain. Melalui media sosial resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat menyebarkan informasi mengenai laporan maupun kegiatan pencegahan, pengawasan, maupun informasi kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Media sosial yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meliputi:



c. Iklan Radio dan Dialog Interaktif

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau diperlukan penyampaian pelayanan informasi publik ke masyarakat luas untuk mencegah atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara pemilu dengan melakukan

sosialisasi pengawasan dengan cara dialog melalui media radio. Radio dapat menjadi sarana publikasi yang cukup efektif untuk melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang gemar mendengarkan radio.

Sepanjang tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menayangkan 3 kali dialog interaktif dan 278 kali jingle. Dialog interaktif dan jingle tersebut ditayangkan oleh LPP RRI Tanjungpinang. Untuk dialog interaktif menayangkan terkait tahapan coklit, kampanye, dan masa tenang. Sedangkan untuk jingle menayangkan terkait tahapan coklit, pencalonan, kampanye, masa tenang, dan pungut hitung.

d. Media Cetak

Media cetak merupakan salah satu media dalam komunikasi massa. Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media eletronik dan juga media digital. Media cetak bisa diartikan juga sebagai sebuah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan masyarakat luas yang disampaikan secara tertulis. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2020 telah menyebarkan berbagai jenis media cetak dalam keterbukaan informasi publik, diantaranya:

* **Brosur PPID**

Dalam keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan informasi mengenai tata cara permohonan informasi, prosedur layanan informasi, waktu pelayanan informasi, dan sebagainya yang termuat dalam brosur PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau





Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sesuai dengan Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan cepat, tepat, dan sedemikian setiap Badan Publik menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memuat dan mengorganisir sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan wajar sesuai prosedur standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Sesuai dan lampiran Jaws PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 19 adalah:

1. Penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengimanan informasi
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan standar yang berlaku
3. Pelebaran informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
4. Penetapan prosedur operasional penyediaan informasi publik
5. Pengujian konsistensi
6. Pengklasifikan informasi yang dikeluarkan yang telah habis jangka waktu pengucapannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
7. Penetapan pertimbangan tertulis atau cetak kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) terdapat 7 jenis yang mengorganisasikan, mencatatkan, dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang harus disediakan oleh setiap instansi publik sebagai berikut:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik

2. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dilakukan oleh setiap unit/instansi kerja di Badan Publik dalam rangka pemutakhiran dan pemeliharaan daftar informasi publik sebelum diumumkan/terbuka dengan pengesahan setiap unit/instansi kerja selanjutnya (jatu) kali dalam sebulan
3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman (media yang terjangkau seluruh pemangku kepentingan) di media perantara

Sumber / Dasar Hukum

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. UU No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Perpres RI No. 68 Tahun 2010 Tentang Kelulusan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Perpres RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
7. Peraturan No. 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslur Provinsi Kepulauan Riau

Bawaslur Terbuka, Perilaku Terpercaya | Servisitas | Mengembangkan Inovasi | Kerja Berkelanjutan | Ketahanan Informasi | Dalam sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap organisasi publik.

Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengimani informasi
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
3. Menyusun dan menetapkan standar operasional (SOP) layanan publik
4. Melakukan pengujian konsistensi
5. Melakukan klasifikasi terhadap informasi di luar pengucapannya
6. Menetapkan informasi yang dibagikan yang telah habis jangka waktu pengucapannya sebagai informasi yang dapat diakses
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atau cetak kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik



* **Baliho**

Bawaslur Provinsi Kepulauan Riau menyebarkan baliho sebanyak 15 yang tersebar di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.





* **Spanduk**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyebarkan spanduk sebanyak 69 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.





* **Stiker**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyebarkan stiker sebanyak 600 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.



* **Brosur**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyebarkan brosur sebanyak 2 rim pada saat patroli pengawasan dan kegiatan sosialisasi maupun kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



* **Standing Roll Up Banner**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyebarkan *standing roll up banner* sebanyak 62 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.





5. Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

* Media Massa

Peran media berpengaruh terhadap pembentukan opini dan meningkatkan reputasi yang baik bagi sebuah instansi di mata masyarakat luas, karena produk dari media berupa berita dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Pemberitaan yang kurang baik akan membawa dampak yang kurang baik pula terhadap citra lembaga atau perusahaan, begitu pun pemberitaan yang baik akan membawa dampak yang baik juga terhadap citra instansi tersebut. Menjalin hubungan baik dengan media perlu dilakukan oleh kehumasan agar lembaga dan media tersebut memperoleh tujuan yang sama, begitu pun juga yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam menjalin



hubungan yang baik tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan media gathering dengan media massa sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2020. Adapun media maupun jurnalis yang telah diundang oleh Bawaslu Kepulauan Riau, diantaranya:

- * AJI (Aliansi Jurnalis Independen)
- * PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)
- * SMSI (Serikat Media Siber Indonesia)
- * IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)
- * IWO (Ikatan Wartawan Online)
- * Antara Kepulauan Riau
- * LPP RRI Tanjungpinang
- * Mercy FM
- * Pandawa FM
- * Onine FM
- * Bintang Radio FM

* **Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama**

Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2020 ini jajaran pengawas pemilu terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas sebagai pengawas pemilu. Hal itu dilakukan agar memenuhi harapan sekaligus tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Namun demikian, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri, SDM Bawaslu secara jumlah masih sangat terbatas untuk dapat mengawasi seluruh proses dan tahapan yang pemilihan kepala daerah ini. Untuk itu Bawaslu sangat membutuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses dan tahapan pemilihan kepala daerah. Sehingga pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka menjalin kerjasama untuk membangun Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu membangun kerjasama melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) dan PKS (Perjanjian Kerjasama). Adapun MoU dan PKS yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya:

* **Universitas Ibnu Sina**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Universitas Ibnu Sina dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2020. Sedangkan untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020. Pada kegiatan penandatanganan ini dari Bawaslu

Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dari Universitas Ibnu Sina dihadiri oleh Dr. H. Mustaqim Syaib, SE., MM selaku Rektor Universitas Ibnu Sina, Dr. Sumiyanti, S.Sos., MM., M.Pd selaku Wakil Rektor I Universitas Ibnu Sina, Andi Auliya Ramadhani, SE., M.Ak selaku Wakil Rektor II Universitas Ibnu Sina, Dr. Sumardin, SE., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Ibnu Sina, Hengky Oktarizal, SKM., M.KM selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kerjasama Kemahasiswaan, Alumni, dan Karir Universitas Ibnu Sina, dan Amirullah, S.Kom., MM selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Universitas Ibnu Sina.



* **Universitas Internasional Batam**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Universitas Internasional Batam dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2020. Sedangkan untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020. Dalam penandatanganan MoU ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari Universitas Internasional Batam yang hadir dalam penandatanganan MoU ini adalah Dr. Iskandar Itan selaku Rektor Universitas Internasional Batam dan Dr. Hepy Hefri Ariyanto selaku Wakil Rektor III Universitas Internasional Batam. Untuk penandatanganan PKS dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Yessi Yunius, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Universitas Internasional Batam yang hadir dalam penandatanganan PKS ini adalah Dr. Hepy Hefri Ariyanto selaku Wakil Rektor III Universitas Internasional Batam.



* **Universitas Batam**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Universitas Batam dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2020. Sedangkan untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020. Dalam penandatanganan MoU ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari Universitas Internasional Batam yang hadir dalam penandatanganan MoU ini adalah Prof. Dr. Ir. Chabullah Wibisono selaku Rektor Universitas Batam, Dr. Laily Wasliati, SH., M.Hum selaku Wakil Rektor III Universitas Batam, Dr. Fadlan, SH., MH selaku Kepala Program Studi S2 Universitas Batam, dan Siti Nurkhotijah, SH., MH selaku Kepala Program Studi S1 Universitas Batam. Untuk penandatanganan PKS dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Said Abdullah Dahlawi, ST selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Universitas Batam yang hadir dalam penandatanganan PKS ini adalah Prof. Dr. Ir. Chabullah Wibisono selaku Rektor Universitas Batam, Siti Nurkhotijah, SH., MH selaku Kepala Program Studi S1 Universitas Batam, dan Dr. Fadlan, SH., MH selaku Kepala Program Studi S2 Universitas Batam.





* **Universitas Riau Kepulauan**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Universitas Riau Kepulauan dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2020. Sedangkan untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020. Dalam penandatanganan MoU ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan data Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari Universitas Riau Kepulauan yang hadir dalam penandatanganan MoU ini adalah Edwin Agung Wibowo, SE., M.Com selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan, Dr. Suryo Hartanto, M.Pd selaku Wakil Rektor I Universitas Riau Kepulauan, Muhammad Hidayat, M.Ak selaku Wakil Rektor Universitas Riau Kepulauan, Adam, M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Riau Kepulauan, dan Sri Langgeng Ratnasari, MM selaku Wakil Rektor IV Universitas Riau Kepulauan. Untuk penandatanganan PKS dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Yessi Yunius, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Universitas Riau Kepulauan yang hadir dalam penandatanganan PKS ini adalah Edwin Agung Wibowo, SE., M.Com selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan.



* **Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Sedangkan untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020. Dalam penandatanganan MoU ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Yessi Yuniuss, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang yang hadir dalam penandatanganan MoU ini adalah Drs. H. Amir Husin selaku Ketua STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang. Untuk penandatanganan PKS dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang yang hadir dalam penandatanganan PKS ini adalah Drs. H. Amir Husin selaku Ketua STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang.



* **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Sedangkan untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020. Dalam penandatanganan MoU ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Yessi Yuniuss, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang hadir dalam

penandatanganan MoU ini adalah DR. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Untuk penandatanganan PKS dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Sekolah Tinggi Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang yang hadir dalam penandatanganan PKS ini adalah DR. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan Sukma Adi Perdana, M.Sc selaku Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.



* **Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan STISIPOL Tanjungpinang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Sedangkan untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020. Dalam penandatanganan MoU ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Yessi Yunius, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari STISIPOL Tanjungpinang yang hadir dalam penandatanganan MoU ini adalah Endri Sanopaka, S.Sos., MPM selaku Ketua STISIPOL Tanjungpinang dan Desrian Effendi selaku Wakil Ketua 3 STISIPOL Tanjungpinang. Untuk penandatanganan PKS dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang yang hadir dalam penandatanganan PKS ini adalah Desrian Effendi selaku Wakil Ketua 3 STISIPOL Tanjungpinang.





* **Universitas Maritim Raja Ali Haji**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan UMRAH dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2020. Sedangkan untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020. Dalam penandatanganan MoU ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Said Abdullah Dahlwai, ST selaku Koordinator Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Yessi Yunius, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari UMRAH yang hadir dalam penandatanganan MoU ini adalah DR. Agung Damar Syakti, S.Pi., DEA selaku Rektor UMRAH. Untuk penandatanganan PKS dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Yessi Yunius, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan UMRAH yang hadir dalam penandatanganan PKS ini adalah Dr. Agus Salim selaku Wakil Rektor II UMRAH, Ary Satya Dharma selaku Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan & Kerjasama UMRAH, dan M. Ulul Azmi selaku Kasubbag Kerjasama UMRAH.



* **Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) dan PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan KPPAD Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020. Dalam penandatanganan MoU dan PKS ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Yessi Yunius, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari KPPAD Provinsi Kepulauan Riau yang hadir dalam penandatanganan MoU dan PKS ini adalah Eri Syahrial, S.Pd., M.Pd.I selaku Ketua KPPAD Provinsi Kepulauan Riau, Titi Sulastri selaku Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kepulauan Riau, Marlia Saridewi selaku Komisioner KPPAD Provinsi Kepulauan Riau, dan Mahmud Syaltut selaku Komisioner KPPAD Provinsi Kepulauan Riau.



* **Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Riau**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) dan PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Kwarda Gerakan Pramuka Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020. Dalam penandatanganan MoU dan PKS ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari Kwarda Gerakan Pramuka Kepulauan Riau yang hadir dalam penandatanganan MoU dan PKS ini adalah Dr.H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si selaku Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kepulauan Riau.



* **PW Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan PWNU Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2020. Sedangkan untuk penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020. Dalam penandatanganan MoU ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH selaku Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari PWNU Kepulauan Riau yang hadir dalam penandatanganan MoU ini adalah Drs. Gani Lasya, MM., MH selaku Ketua PWNU Kepulauan Riau, Herianto selaku Sekretaris PWNU Kepulauan Riau, Suigwan selaku Bendahara PWNU Kepulauan Riau, dan Rahmad Budi Harto, SE., MM selaku Ketua PW GP Ansor Kepulauan Riau. Untuk penandatanganan PKS dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan PWNU Kepulauan Riau yang hadir dalam penandatanganan PKS ini adalah Herianto selaku Sekretaris PWNU Kepulauan Riau, Dr. Sudianto, SE., M.Si selaku Wakil Sekretaris PWNU Kepulauan Riau, Dr. Sumardin, SE., MM selaku Wakil Ketua PWNU Kepulauan Riau, Rizki Firmanda, S.Sos selaku Sekretaris PW GP Ansor Kepulauan Riau, dan Agung Prahcetyo selaku Wakil Sekretaris PW GP Ansor Kepulauan Riau.





* **LPP RRI Tanjungpinang**

Kegiatan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan LPP RRI Tanjungpinang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2020. Dalam penandatanganan PKS ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Muhammad Sjahri Papene, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Said Abdullah Dahlawi, ST selaku Koordinator Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari LPP RRI Tanjungpinang yang hadir dalam penandatanganan PKS ini adalah Heri Musharoni, ST., MT selaku Kepala LPP RRI Tanjungpinang, Ananta Satria Bagitta, S.PT selaku Kepala Bidang Program Siaran LPP RRI Tanjungpinang, Vespa Krisnawati, S.Pd., M.Si selaku Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Tanjungpinang, Benny Rustam, ST., MT selaku Kepala Bidang Teknologi Media Baru LPP RRI Tanjungpinang, Sukardi Arifin, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberitaan LPP RRI Tanjungpinang, dan

Suhardi Slamet selaku Kasi Pengembangan Berita LPP RRI Tanjungpinang.



- * **Gugus Tugas Pengawasan Kampanye, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Kegiatan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Gugus Tugas Pengawasan Kampanye, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020. Dalam penandatanganan MoU ini dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Idris, S.Th.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi

Kepulauan Riau, dan Yessi Yunius, SE., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dari Gugus Tugas Pengawasan Kampanye yang hadir dalam penandatanganan MoU ini adalah Sriwati, SE, MM selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Zuhendri, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Henky Mohari, S.Pt selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Kombes Pol Harry Goldenhardt S, S.I.K., M.Si selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepulauan Riau.



BAB II

PROGRAM KHUSUS

Hotline PPID (WhatsApp)

Tuntutan perkembangan teknologi dan informasi yang digunakan untuk mempermudah komunikasi. Salah satunya teknologi dari aplikasi *whatsapp* yang sangat mudah untuk dijangkau dan dioperasikan oleh pengguna serta fleksibilitas. Hal ini mendorong PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk menyajikan layanan ini. Tujuan dari layanan konsultasi melalui *whatsapp* ini adalah mempermudah pengguna dalam mengakses dan meminta informasi publik. Pemohon informasi dapat menghubungi *hotline* PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai media komunikasi dalam mengoptimalkan pelayanan informasi secara cepat.



Podcast Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Podcast merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, dimana *podcast* bertujuan menyampaikan opini, berbagai informasi dan ilmu terkait isu-isu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara terbuka di ruang-ruang publik melalui web dan media sosial yang sudah dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. *Podcast* juga sebagai sarana tanya jawab atau forum diskusi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang didalamnya ada yang berperan sebagai *host* dan pembicara atau narasumber. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 ini

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berencana membangun *podcast* dimana sangat penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.



Program Khusus Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

1. Bawaslu Kota Batam

Belum adanya program khusus yang ada di Bawaslu Kota Batam.

2. Bawaslu Kota Tanjungpinang

* Podcast Bincang Pengawasan

Program ini merupakan hasil dari diskusi dengan Kader SKPP Bawaslu Kota Tanjungpinang. Dalam pelaksanaannya Bawaslu Kota Tanjungpinang juga melibatkan kader-kader SKPP untuk berbagi pengetahuan tentang kepemiluan. Podcast Bincang Pengawasan ini baru berjalan 1 (satu) kali yaitu pada masa tenang Pilkada serentak Tahun 2020 dan kedepannya akan terus dilaksanakan.



* Dialog Pilkada Tahun 2020

Program ini merupakan kerja sama dengan beberapa media massa baik itu media radio maupun televisi serta beberapa Podcast channel Youtube membahas isu-isu politik di Kota Tanjungpinang. Selama Pilkada Tahun 2020 program ini rutin dilaksanakan dalam rangka sosialisasi tentang pengawasan Pilkada Tahun 2020.



3. Bawaslu Kabupaten Bintan

- * Kontak WhatsApp Business

Seiring dengan banyaknya penggunaan aplikasi pesan instan WhatsApp dikalangan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bintan membuat sebuah kontak pada WhatsApp Business dengan menggunakan nomor 4443919, hal ini dilakukan guna lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Sarana informasi pada WhatsApp ini digunakan sebagai media komunikasi penyampaian pesan sosialisasi dan juga sebagai tempat melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu.



* Podcast Pengawasan Partisipatif

Radio Podcast dengan nama Radio Pengawasan Pemilu Bintan dibuat sebagai media informasi yang dilakukan dalam format suara. Perbincangan dengan tema pengawasan pemilu dan pengumuman rekrutmen Pengawas adhoc menjadi topik pilihan utama. Targetnya adalah mereka yang gemar mendengarkan radio streaming sebagai hiburan. Sepanjang Tahun 2020, Bagian humas telah menayangkan 10 episode pada podcast pengawasan Pemilu Bintan diantaranya sebagai berikut :

- Panwaslu Kecamatan tutup Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa
- Pilkada Bintan tanpa calon perseorangan
- Sertifikasi Pengawasan Pemilu
- Tanya Jawab Dampak Corona Terhadap Pilkada 2020
- Himbauan kepada Warga dalam mencegah penyebaran virus corona
- Marhaban Ya Ramadhan
- Idul Fitri 1441 H
- Imbauan Kadinkes Kabupaten Bintan
- Imbauan Dr. Gama Kadinkes Kabupaten Bintan
- Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS 2020

Streaming podcast Radio Pengawasan Pemilu Bintan ini dapat didengarkan pada berbagai platform ternama diantaranya : Spotify, Pocket Cast, Google Podcasts, Apple Podcast, dan Anchor FM.



* **Patroli Siber Pengawasan Partisipatif**

Sebuah kanal pada website Bawaslu Kabupaten Bintang menjadi rujukan dalam menanggulangi hoaks dan berbagai disinformasi. Bagian humas Bawaslu Kabupaten Bintang secara aktif memantau media – media yang bermuatan kampanye hitam selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bintang.

Sebanyak 9 konten hoaks dan disinformasi telah dipublikasikan pada kanal ini, tidak hanya publikasi hoaks sarana pelaporan terhadap konten yang belum terverifikasi dapat dilaporkan menjadi informasi awal pada kanal ini. Namun demikian, belum terdapat pelaporan dari masyarakat pada kanal tersebut.

Dengan menggandeng Siber Polri yang ada pada Polres Bintang dan kanal berita hoaks yang dimiliki Kominfo RI, Bawaslu Kabupaten Bintang berkomitmen menjadikan kanal patrol siber ini sebagai rujukan terhadap berita yang belum terverifikasi khususnya pemberitaan seputar kepemiluan di Kabupaten Bintang.



* **Domain Panwascam.id**

Bawaslu Kabupaten Bintang pada bulan Februari 2020 telah menyediakan domain untuk Pengawas adhoc ditingkat Kecamatan dengan nama panwascam.id, Domain ini digunakan sebagai alamat email bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintang.



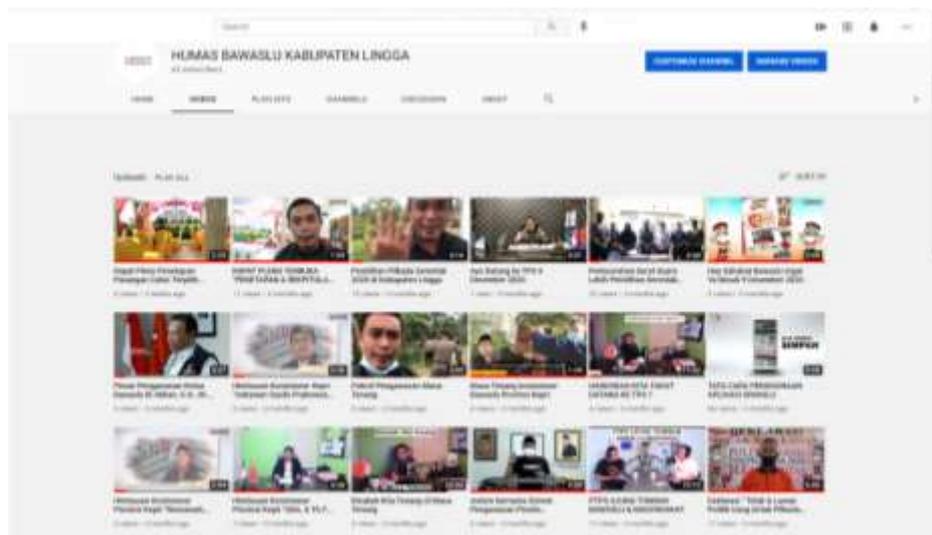
Sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Bintan telah menggunakan email panwascam.id dengan alamat :

Kec. Bintan Timur	bintim@panwascam.id
Kec. Bintan Utara	binut@panwascam.id
Kec. Teluk Sebong	teluk.sebong@panwascam.id
Kec. Mantang	mantang@panwascam.id
Kec. Bintan Pesisir	binsir@panwascam.id
Kec. Tambelan	tambelan@panwascam.id
Kec. SKL	lobam@panwascam.id
Kec. Gunung Kijang	guki@panwascam.id
Kec. Toapaya	toapaya@panwascam.id
Kec. Teluk Bintan	teluk.bintan@panwascam.id

4. Bawaslu Kabupaten Lingga

* Channel Youtube

Kehumasan Bawaslu Kabupaten Lingga menggunakan media sosial youtube untuk memberikan informasi pemberitaan dan kegiatan yang dilakukan oleh kehumasan, memberikan pembelajaran seputaran pilkada dan memberikan peristiwa-peristiwa yang menyangkut tentang pilkada tahun 2020. Seperti berikut ;

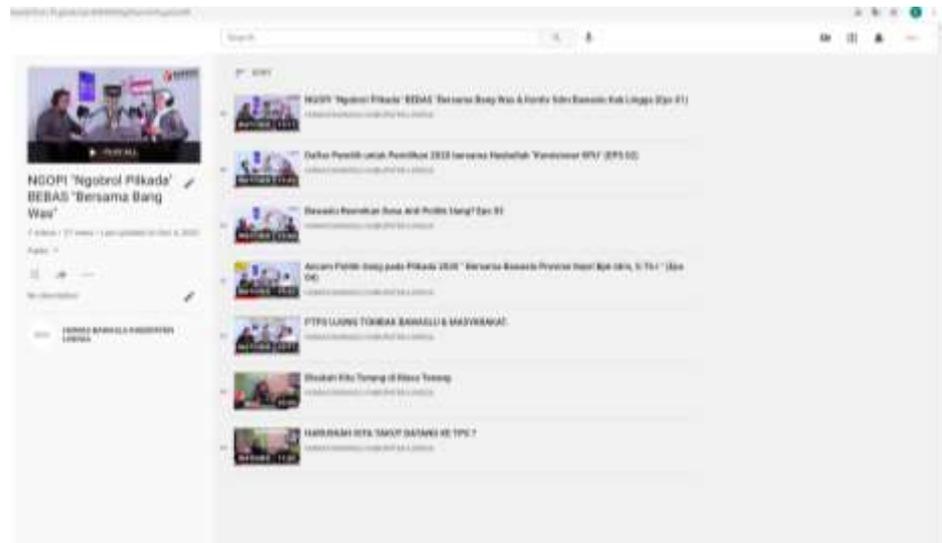


* Podcast Bawaslu Kabupaten Lingga

NGOPI “Ngobrol Pilkada” Bebas “Bersama Bang Was” dalam podcast ini Kehumasan berperan sangat penting, menyediakan pokok pembahasan mengenai seputaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lingga tahun 2020. Membahas program-program Bawaslu Provinsi seperti di resmikan Desa Anti Politik Uang di kabupaten Lingga, mengundang komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk membahas seputaran Pilkada 2020. Di sini kehumasan memanfaatkan media sosial yang lagi trend yaitu

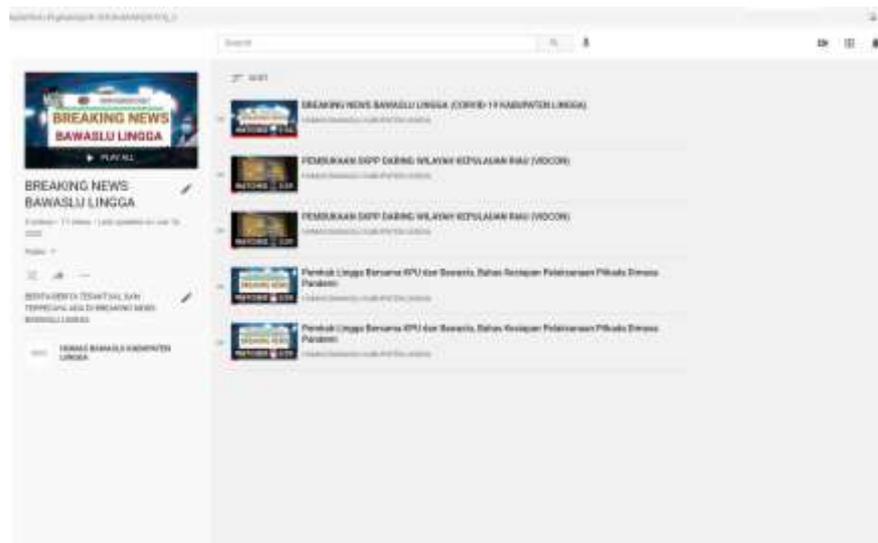


youtube, ini dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang seputaran pilkada. Seperti berikut:



* Breaking News Bawaslu Kabupaten Lingga

Kehumasan membuat inovasi terbaru tentang seputaran pemberitaan dengan memanfaatkan Youtube untuk menjadi salah satu tempat untuk pemberitaan dengan video rekaman yang dilakukan kehumasan Bawaslu Kabupaten Lingga. Seperti berikut:



* Website

Humas Bawaslu Kabupaten Lingga memanfaatkan website www.linggakab.bawaslu.go.id untuk menjadi sarana informasi yang humas berikan dalam hal pemberitaan berita yang update seputaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 Seperti berikut:



- * Pejabat Pengelolaan Informasi & Dokumentasi (PPID)
Permohonan informasi online di untuk mempermudah masyarakat dalam mengambil informasi yang di butuhkan secara online di dalam website <https://www.ppid.linggakab.bawaslu.go.id/permohonan-informasi/> seperti berikut:



- * Kerja sama dengan beberapa media masa untuk memperkuat kehumasan sebagai Garda terdepannya informasi Bawaslu Kabupaten Lingga. Media juga memberitakan kegiatan dan langkah-langkah pegawasan pada semua tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten lingga.
- * Spanduk dan Himbauan
Dalam menginformasikan kepada masyarakat, kehumasan juga memberi himbau melalui spanduk. Banyak tersebar di setiap wilayah kecamatan untuk menghimbau kepada masyarakat.



Himbauan Netralitas ASN Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020

a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN
b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
d. Keputusan bersama Menteri Pendidikan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2020, Nomor 890-2836 Tahun 2020, Nomor 157/KEP/2020, Nomor 6/SRB/K/ASN/2020, Nomor 0514/Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020

- 1. Pegawai Perangkat Daerah**
 - Agar lebih menegakkan Kode Etik dan memberikan ketegasan pada Pegawai Negeri Sipil, PTT dan THL, serta melaksanakan hak pilihnya secara bebas dan adil serta menjaga Netralitas serta tidak mengabdikan jabatan atau melakukan aktivitas ASN/ASN, PTT dan THL diluar tugasnya.
 - Melakukan Pengawasan terhadap PNS/ASN, PTT dan THL terkait proses maupun penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, agar tetap mematu peraturan penyelenggaraan dan ketentuan ketentuan yang berlaku.
- 2. PNS/ASN, PTT dan THL** yang telah merasa khawatir yang ada, sehingga ingatkan dalam menghadapi situasi politik, tidak melibatkan diri pada proses kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan tidak menggunakan nama, rekam jejak yang merugikan pada keberagaman pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta pemilu seperti Permisian, sukar, hasutan, serta baik secara lisan, tulisan maupun simbol kampanye atau pemberian hadiah kepada pegawai dalam kampanye dan lain, seperti halnya dan seterusnya.
- 3. PNS/ASN, PTT dan THL** agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, termasuk kampanye melalui media sosial seperti Ska, kompas atau sejenisnya, termasuk penggunaan akun yang mendebat/didak, mendebat pasangan calon kepala Daerah tertentu.
- 4. Bagi PNS/ASN, PTT dan THL** yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan penyelenggaraan terkait Netralitas dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan penyelenggaraan yang berlaku.

"Jadi pengawas kok takut, dikit-dikit konsultasi. Pengawas harus berani berkeputusan. Sepanjang berada di jalan kebenaran, jangan takut dan ingat, Menyampaikan informasi ke publik itu adalah bagian dari pencegahan"

**Mari Kita
AWASI
Pelaksanaan
PILKADA
Serentak
2020**

**TOLAK & LAWAN
POLITIK
UANG**

MENJALIKAN atau MEMBERIKAN uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan kepada calon tertentu terancam pidana penjara 6 Tahun dan denda 1 milyar.

Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016

5. Bawaslu Kabupaten Karimun

* Pemanfaatan Video

a. Video Kompilasi Kabar Sepekan

Video Kompilasi Kabar Sepekan merupakan video singkat berupa rangkuman dari kumpulan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dalam sepekan terakhir yang kemudian dikemas serta diolah dengan sedemikian menarik.



b. Video Iklan Layanan Masyarakat

Video serupa dengan iklan layanan masyarakat beberapa kali telah dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Karimun, baik yang berkaitan dengan pemilihan maupun yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai salah satu bentuk kepedulian Bawaslu Kabupaten Karimun kepada masyarakat.



Dari beberapa video yang telah di publish, terdapat sebuah video cerita pendek berjudul lebaran tanpamu yang dibuat secara mandiri oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dan berhasil mencapai seribu views. Meskipun belum terdapat unsur kepemiluan didalamnya, namun video yang berisi ajakan untuk tetap dirumah dan tidak berpergian selama libur Hara Raya Idul Fitri ini diharapkan mampu menarik pengunjung untuk mengenal lebih dalam Bawaslu Kabupaten Karimun dan dunia pengawasan dengan menjadi pengikut setia di website maupun seluruh akun media sosial Bawaslu Kabupaten Karimun.

* Penyediaan Berbagai Kemudahan Pelayanan Masyarakat

Sosialisasi juga dilakukan oleh Kehumasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap kemudahan bagi pelayanan publik yang diberikan Bawaslu Kabupaten kepada masyarakat melalui media sosial seperti pelaporan dugaan pelanggaran, pengajuan sengketa dan permohonan informasi publik yang dapat dilakukan secara daring.

Penyediaan berbagi media layanan tersebut bertujuan agar dapat mengurangi tatap muka secara langsung sehingga menjadi sangat bermanfaat terutama dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini.



6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun 2020 adalah tahun berduka untuk masyarakat dunia dimana pada tahun ini merebaknya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di hampir seluruh Negara di dunia. Indonesia adalah salah satu Negara yang terdampak dari penyebaran Covid-19 yang dimana pemerintah Indonesia telah mengumumkan pandemi Covid-19 sudah masuk ke Indonesia pada Maret 2020 sejak di temukan kaluster pertama Covid-19 di tanah air. Pada awal bulan April 2020 presiden Republik Indonesia mengeluarkan kepres tentang *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* bencana non-alam sebagai bencana nasioanal. Hal ini memberi pengaruh yang cukup besar pada program - program kerja seluruh badan publik yang ada di Indonesia. Bawaslu sebagai badan publik yang di amanatkan oleh undang undang untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Pada tahun yang sama Indonesia juga akan melaksanakan perhelatan nasional yaitu pemilihan kepala daerah serentak di 270 Daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.

Provinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 7 Kabupaten / Kota yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota. Rincian kabupaten / Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah 5 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas.

Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas berada di Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Di masa pandemic covid-19 Tahun 2020 kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas memfokuskan Program peningkatan Kapasitas sumber daya Manusia kehumasan, pengelolaan informasi, dan pengelolaan media online.

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas banyak dilakukan secara daring hal ini di lakukan selain untuk penguatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjawab tantangan kebutuhan informasi kepemiluan dimasyarakat juga untuk mensukseskan program pemerintah republik Indonesia dalam penanganan pencegahan penularan covid-19 di Indonesia. Berikut kami sajikan program yang dilaksanakan serta diikuti oleh Kehumasan Bawaslu Kabupaten kepulauan anambas selama tahun 2020 sebagai berikut:

* Program penguatan kapasitas SDM humas secara daring

a. Pembuatan penulisan berita, fotografi, dan videografi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diikuti secara daring humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas pada rabu (13/05/2020). Narasumber yang hadir pada kegiatan ini adalah

Bpk. Nikolas Panama, SH.,M.Pd (Pewartanya Antara) dan Bpk. Andri Mediansyah (Fotografer Inilah Kepri) pada kegiatan ini difokuskan untuk peningkatan kualitas penulisan berita, fotografi dan videografi staf Kehumasan.



b. Strategi dan Kiat Rating dan Popularitas Media Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diikuti secara daring humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas pada Jum'at (15/05/2020) narasumber yang hadir pada kegiatan ini adalah Bpk. Sulastio (Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI) dan Bagus Dwi Perdanan (Staf Bagian Humas Bawaslu RI). Pada kegiatan ini membahas tentang bagaimana strategi pemeringkatan rating media social Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.



c. Penguatan Kapasitas Kehumasan – Peran Web dan Media Sosial pada Pilkada 2020

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diikuti secara daring humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas pada Kamis pada Rabu (17/09/2020) narasumber yang hadir pada kegiatan ini adalah Sulastio (Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI), Haryo Sudrajat (Kasubag Publikasi & Dokumentasi Bawaslu RI) dan Eko Nugroho (Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM kehumasan apa dan Bagaimana peran website dan medsos Bawaslu Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.



d. Teknik Pendokumentasian Bidang Kehumasan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diikuti secara daring humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas pada Kamis (18/09/2020) narasumber yang hadir pada kegiatan ini adalah Haryo Sudrajat (Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi Bawaslu RI) dan Ahmad Ali Imron (Kasubbag Humas Bawaslu RI). Kegiatan ini Menjelaskan tentang bagaimana teknik pendokumentasian kehumasan yang baik dan benar.



* Program Pengelolaan Informasi

Keterbukaan informasi publik saat ini sudah menjadi komitmen bersama seluruh lembaga publik, karena dengan adanya Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 menandakan bahwa pemerintah serius dalam membangun transparansi informasi yang dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu khususnya pada Pilkada serentak



lanjutan dimasa pandemik Covid-19 tahun 2020, dan merupakan salah satu Badan Publik yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas melalui bidang kehumasan menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan.

Implementasi keterbukaan informasi publik lewat program PPID tentu tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi saat ini. Berbagai macam platform media internet dimanfaatkan untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Pada tanggal 06 April 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 084/K.Bawaslu-KR-05/KP.00.04/IV/2020 Tentang Tim pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020. Pembentukan tim PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi khususnya tentang pemilihan.

Untuk membangun transparansi informasi yang sudah diamanatkan oleh undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah melengkapi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruangan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas Berada di lantai II Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas yang beralamat di Jl.Ahmad Yani RT.002 RW.002. Desa Tarempa Barat Kecamatan.Siantan. fasilitas yang ada di ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 1 set meja dan kursi pelayanan serta 1 orang staf yang bertugas sebagai desk informasi yang bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang diajukan oleh pemohon. Perlengkapan alat kerja di PPID Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

- Komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet
- Formulir permohonan informasi



- Formulir Bukti Tanda terima informasi
- Buku tamu
- Alat tulis kantor
- Lemari arsip



	BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	Bawasku Kabupaten Kepulauan Anambas Jl. Ahmad Yani No.27 RT.02 RW 02 Desa Tarampa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Email : bawaskukab@gmail.com Kode Pos : 29791
FORMULIR PERHUBUNGAN INFORMASI No. Pendaftaran/Label pengesahan IP** :		
Nama :		
Alamat :		
Pekerjaan :		
Nomor Telepon/Email :		
Materi Informasi yang ditanyakan :		
(Isilah/Isikan terlebih bila perlu) :		
Tujuan Pengiriman Informasi :		
Cara Memperoleh Informasi*** :		
1. <input type="checkbox"/> Melalui Membran/Melewatkan Membran****		
2. <input type="checkbox"/> Melalui/Isikan melalui Informasi (hard copy / softcopy)****		
Cara mendapatkan Salinan Informasi*** :		
1. <input type="checkbox"/> Langsung		
2. <input type="checkbox"/> Kurir		
3. <input type="checkbox"/> Pos		
4. <input type="checkbox"/> Telekside		
5. <input type="checkbox"/> E-mail		
Tarampa 2020		
Petugas Pelayanan Informasi (Penerbitan Permisian)		Penerima Informasi
(.....)		(.....)
Nama dan Tanda Tangan		Nama dan Tanda Tangan
Keterangan : * Pilih salah satu ** Dasi oleh pengesahan berdasarkan nomor registrasi *** Pilih salah satu dengan member tanda (+) **** Cara yang tidak perlu		



	BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas Jl. Ahmad Yani No.27 RT.02 RW.02 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Email : bawasluka@gmail.com Kode Pos : 29791
	TANDA BUKTI FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI	
Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik:		
a. Nama		
b. Alamat		
c. Tanggal penyerahan formulir permohonan		
d. Nomor Registrasi Permohonan		
Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik:		
a. Nama		
b. Alamat		
Tarempa 2020		
Yang menerima (Petugas Pelayanan)		Yang menyerahkan (Pemohon Informasi)
(.....)		(.....)
Nama dan Tanda Tangan		Nama dan Tanda Tangan



b. Website PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi public Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas juga meyediakan Website khusus PPID Kabupaten Kepulauan Anambas yang beralamatkan di www.ppid.anambaskab.bawaslu.go.id. Melalui website ini masyarakat mudah mendapatkan informasi yang di butuhkan dengan cara mengklik dan mengunduh dokumen informasi yang di butuhkan. Bawaslu Kabuupaten Kepulauan Anambas akan memperbanyak konten - konten dan document informasi khusus kepemiluan sehingga di harapkan website PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memenuhi kebutuhan informasi kepemiluan masyarakat khususnya masyarakat Yang ada dikabupaten Kepulauan Anambas. Berikut kami sajikan tampilan website utama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas dan website PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas:

- Website utama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas



- Website PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas



c. Penyediaan Akses Informasi

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar. Hal ini merupakan langkah awal berkerjanya PPID Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tugas dan tanggung



jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut Beberapa medium akses informasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, Jl.Ahmad Yani RT.002 RW.002 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
- melalui Hotline PPID 0812-7577-1249 (WhatsApp)
- Mengajukan permohonan Melalui surat elektronik ke email: bawaslukka@gmail.com
- Mengajukan permohonan Melalui surat elektronik ke email: ppid.bawaslukka@gmail.com
- Mendownload informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas

* Kegiatan Pemberitaan Peresmian Desa Anti Politik Uang (APU)

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah.

Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu dan pilkada, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah salah satu Kabupaten yang tergolong rawan akan praktik politik uang pada penyelenggaraan pilkada serentak lanjutan dimasa pandemi covid-19 tahun 2020. Untuk membatasi ruang gerak bagi pelaku politik uang Bawaslu Kabupaten Kepulauan

Anambas meresmikan desa Tebang Kecamatan Palmatak sebagai Desa Anti Politik Uang pertama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Desa anti politik uang ini di resmikan langsung oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja,SH L.L.M.

Peresmian desa Anti Politik Uang salah satu upaya pencegahan yang di lakukan oleh Bawaslu untuk praktik politik uang di Indonesia. Hal ini menunjukkan besarnya tekad seluruh jajaran Bawaslu untuk memerangi politik uang yang kerap terjadi pada kontestasi politik seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia khusus nya pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan dimasa Pandemi covid – 19 tahun 2020 di Kabupaten kepulauan Anambas.

Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas pada kegiatan ini terus melakukan koordimasi baik di internal Bawaslu dan eksternal untuk mensukseskan kegiatan peresmian Desa Anti Politik Uang (APU). Pengekspostan berita tentang desa APU dilakukan oleh humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas pada media online dan media sosial Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas dan bekerja sama dengan insan media dalam publikasi kegiatan Desa APU. Pemberitaan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sekaligus untuk sosialisasi bahayanya praktik politik uang untuk kontestasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan dimasa Pandemi covid – 19 tahun 2020 di Kabupaten kepulauan Anambas.



7. Bawaslu Kabupaten Natuna

Bawaslu Kabupaten Natuna melakukan berbagai inovasi dalam menyampaikan informasi ke pemilu dan mendukung masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

* Membuat video pengawasan

Dalam upaya mencerdaskan masyarakat pemilih, Bawaslu Kabupaten Natuna membuat film pendek tentang bahaya politik uang dengan judul "Mileh". Film pendek ini bercerita tentang satu keluarga yang dalam kondisi ekonomi yang sulit, tetapi tetap menjaga integritasnya dengan menolak politik uang dan upaya sosialisasi bahaya politik uang oleh Bawaslu. Film ini sengaja menggunakan bahasa daerah Kabupaten Natuna agar pesan-pesan yang disampaikan dalam film pendek ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Natuna baik yang usia muda maupun tua. Film "Mileh" dapat disaksikan di channel youtube Bawaslu Kabupaten Natuna.



* Membuat animasi 2D

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, seperti di bidang multimedia turut dimanfaatkan oleh Humas Bawaslu Kabupaten Natuna untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik dengan membuat video animasi 2D. Diantara video animasi yang dibuat adalah:



- Video Animasi Tolak dan Lawan Politik Uang



- Video Anmiasi Penerapan Protokol Kesehatan



- Video Animasi Tips Work From Home



Selain itu Bawaslu Kabupaten Natuna juga mempublish vidio animasi yang dishare oleh Bawaslu RI diantaranya:

- Tugas Panwaslu Kecamatan, PKD dan PTPS
- Sosialisai tata cara penggunaan aplikasi Siwaslu

* Membuat Infografis yang Menarik

Pembuatan infografis yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat seperti menambahkan karikatur dalam setiap infografis untuk menarik minat masyarakat tentang kepemiluan.



* Pembuatan Laman Resmi

Website atau laman resmi merupakan sarana bagi instansi atau lembaga dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan mudah. Website juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat terkait kerja-kerja Bawaslu selama melakukan pengawasan Pemilu maupun Pilkada. Adapun pembaharuan yang dilakukan pada laman resmi Bawaslu Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- Pada halaman depan ditampilkan informasi berupa infografis fokus pengawasan tahapan pemilihan, larangan-larangan selama tahapan pemilihan beserta sanksinya.
- Terdapat informasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran seperti jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP), jumlah surat pencegahan, laporan dugaan pelanggaran dan temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang *di-update* secara berkala.
- Melakukan *update* konten maupun berita kepemiluan secara berkala

* Menyebarkan Spanduk, Brosur, dan Banner

Dalam rangka meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kepemiluan, Bawaslu Kabupaten Natuna membagikan x-banner ke berbagai tempat yang dirasa strategis dan banyak dikunjungi oleh masyarakat.

Terdapat tiga jenis x-banner yang dibagikan yang terbagi dalam 3 divisi yaitu divisi SDM Organisasi dan Datin, divisi Pengawasan, Humas dan Hubal, Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Masing-masing x-banner memuat informasi yang berbeda-beda yang dianggap penting.



BAWASLU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

"Ponyup dan orang yang menarima suap berada dalam Neraka" (HR. Thabrani)

STOP POLITIK UANG POLITISASI SARA UJARAN KEBENJARAN HOAX

Sanksi penjara paling lama 72 bulan serta denda maksimal 1 Milyar (Pasal 107A UU No 99 Tahun 2016)

Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

- Gunakan Masker
- Rajin Cuci Tangan
- Tetap Jaga Jarak

Mari Ciptakan Pilkada Natuna yang Aman, Damai & Berkualitas

Jangan pernah bermimpi punya pemimpin yang jujur & amanah, jika kita sebagai rakyat hak suaranya masih bisa dibeli

Jangan Ambil Jemputan Logokan Orangnya

AYO AWAS! PILKADA 2020

BAWASLU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

AYO AWAS! PILKADA 2020

STOP POLITIK UANG

Pilkada adalah bukan lagi ajang jual beli dalam demokrasi, melainkan ajang berprestasi sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin terbaik untuk memimpin daerah.

WASITAMA LPK

BAWASLU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

AYO AWAS! PILKADA 2020

STOP POLITIK UANG

LARANGAN DALAM KAMPANYE

1. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107A Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
2. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107B Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
3. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107C Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
4. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107D Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
5. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107E Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
6. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107F Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
7. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107G Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
8. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107H Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
9. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107I Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
10. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107J Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016
11. Melakukan kampanye dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 107K Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2016

WASITAMA LPK

BAWASLU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

AYO AWAS! PILKADA 2020

STOP POLITIK UANG

Pemberi dan penerima suap dipidana

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107A UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107B UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107C UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107D UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107E UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107F UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107G UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107H UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107I UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107J UU No 99 Tahun 2016)

Sanksi pidana penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 107K UU No 99 Tahun 2016)

WASITAMA LPK

BAB III

PENGAKUAN/PENGHARGAAN DARI PIHAK LAIN

Penghargaan Lembaga Informatif dari Bawaslu RI

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2020 dari Bawaslu RI. Dari 34 provinsi se-Indonesia, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu provinsi yang berhasil masuk pada kategori “**INFORMATIF**”. Selain Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang masuk kategori informatif, provinsi lainnya yang juga dinobatkan sebagai lembaga informatif oleh Bawaslu RI, diantaranya Bawaslu Provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Penganugerahan keterbukaan informasi publik sebagai lembaga informatif yang telah diberikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi motivasi agar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat mempertahankan predikat ini dan menjadi lebih baik lagi kedepannya, senantiasa konsisten terus meningkatkan pelayanan atas tuntutan informasi dari publik, dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan yang transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.





BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa akibat Covid-19 ini, pemerintah perlu terus berkomunikasi secara efektif karena akan sering muncul ketidakpastian dan bahkan banyak yang akan bermunculan informasi-informasi yang salah (hoax). Maka, disinilah peranan kunci humas sebagai agen komunikasi menjadi semakin penting.

Dalam masa pandemi Covid-19 yang tidak tahu kapan berakhir, maka tidak menghalangi kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk terus melakukan peningkatan kualitas kinerja-kinerja kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan publik dan menyebarkan informasi yang menarik dan informatif kepada masyarakat.

Rekomendasi

1. Kumpulan hasil karya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau seperti jurnal, buku, maupun hasil karya lainnya dapat dipajang di ruangan PPID, sehingga pemohon dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi serta mengetahui apa saja karya yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dilakukan penyelarasan menu dan penyelarasan standar penulisan berita pada website Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Digitalisasi data dan informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu prioritas untuk menyelematkan data dan dokumen yang ada.
4. Dalam penyampaian informasi pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan informasi kelembagaan pada website dan media sosial resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau harus transparan dan akuntabel.
5. Terus mendorong dan melakukan penguatan kapasitas kehumasan di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehumasan di Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi lebih baik baik dari segi SDM, ruangan, sarana prasarana, website maupun media sosial.



Penutup

Demikian laporan akhir kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi catatan, evaluasi dan refleksi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kehumasan. Kritik dan saran dari berbagai pihak tetap kami harapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan perbaikan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Semoga laporan ini bermanfaat.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

bersama
BAWASLU TEGAKKAN
KEADILAN
bersama
RAKYAT AWASI
PEMILU



JL. WR. SUPRATMAN, NO.4-7 TANJUNG PINANG
TELP. 0771 - 4444074 PROVINSI KEPULAUAN RIAU